

# PROFIL KEMISKINAN PROVINSI MALUKU UTARA 2013



<http://malut.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI MALUKU UTARA

No Katalog: 3205005.82

**PROFIL KEMISKINAN  
PROVINSI MALUKU UTARA 2013**

<http://malut.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI MALUKU UTARA**

# **PROFIL KEMISKINAN PROVINSI MALUKU UTARA 2013**

Katalog BPS	: 3205005.82
No. Publikasi	: 82520.1416
Ukuran Buku	: 21,5 cm x 16,5 cm
Jumlah Halaman	: 82 halaman
Naskah	: BPS Provinsi Maluku Utara
Desain Sampul	: Bidang Statistik Sosial
Diterbitkan Oleh	: BPS Provinsi Maluku Utara
Dicetak Oleh	: Percetakan Ardani Ternate
Tahun	: 2014

**Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya**

## KATA PENGANTAR

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah. Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran.

Publikasi “Profil Kemiskinan Provinsi Maluku Utara” menyajikan data dan informasi kemiskinan yang mencakup metodologi penghitungan tingkat kemiskinan yang digunakan oleh BPS. Selain itu, publikasi ini juga menyajikan analisis perkembangan tingkat kemiskinan, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan, distribusi dan ketimpangan pengeluaran serta profil rumah tangga miskin di Maluku Utara. Data kemiskinan yang disajikan dalam publikasi ini adalah hasil pengolahan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

Diharapkan publikasi ini akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, terutama pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian publikasi ini, diucapkan penghargaan yang tinggi dan terima kasih yang tulus. Saran dan kritik dari berbagai pihak terutama dari pengguna data sangat diharapkan untuk perbaikan dan kesempurnaan publikasi yang akan datang.

Ternate, November 2014  
BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI MALUKU UTARA  
Kepala

**M. Habibullah, S.Si, M.Si**  
**NIP. 19670619 198901 1 001**

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
Daftar Tabel .....	v
Daftar Gambar .....	vii
<b>Bab I      Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Ruang Lingkup.....	2
1.3. Data Yang Digunakan .....	2
<b>Bab II     Kajian Literatur .....</b>	<b>3</b>
2.1. Definisi Kemiskinan .....	3
2.2. Pendekatan Penghitungan Kemiskinan .....	7
<b>Bab III    Metodologi .....</b>	<b>16</b>
3.1. Penghitungan Kemiskinan .....	16
3.2. Indikator Kemiskinan .....	21
3.3. Distribusi dan Ketimpangan Pendapatan .....	22
<b>Bab IV     Ulasan Tingkat Kemiskinan Provinsi Maluku Utara .....</b>	<b>27</b>
4.1. Garis Kemiskinan Provinsi Maluku Utara.....	27
4.2. Jumlah Penduduk Miskin .....	29
4.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan.....	31
4.4. Indeks Keparahan Kemiskinan .....	33
4.5. Distribusi dan Ketimpangan Pengeluaran.....	35

<b>Bab V</b>	<b>Ulasan Tingkat Kemiskinan Provinsi Maluku Utara .....</b>	<b>39</b>
	5.1. Karakteristik Sosial Demografi .....	40
	5.2. Karakteristik Tempat Tinggal (Perumahan) .....	41
	5.3. Karakteristik Ketenagakerjaan .....	50
	5.4. Karakteristik Pendidikan .....	52
	5.5. Program Bantuan kepada Rumah Tangga Miskin .....	54

<http://malut.bps.go.id>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Beberapa Kriteria dan Garis Kemiskinan .....	10
Tabel L.1.	Garis Kemiskinan di Provinsi Maluku Utara Menurut Daerah, Tahun 2009 – 2013 .....	57
Tabel L.2.	Garis Kemiskinan di Provinsi Maluku Utara Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2011 – 2013 .....	58
Tabel L.3.	Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Maluku Utara Menurut Daerah, Tahun 2009 – 2013 .....	59
Tabel L.4.	Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Maluku Utara Menurut Daerah, Tahun 2009 – 2013 .....	60
Tabel L.5.	Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Maluku Utara Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2011 – 2013 .....	61
Tabel L.6.	Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Maluku Utara Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2011 – 2013 .....	62
Tabel L.7.	Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Maluku Utara Menurut Daerah, Tahun 2009 – 2013 .....	63
Tabel L.8.	Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Maluku Utara Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2011 – 2013 .....	64
Tabel L.9.	Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Maluku Utara Menurut Daerah, Tahun 2009 – 2013 .....	65
Tabel L.10.	Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Maluku Utara Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2011 – 2013 .....	66
Tabel L.11.	Koefisien Gini Provinsi Maluku Utara Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2011 – 2013 .....	67

Tabel L.12.	Distribusi Pengeluaran Menurut Kriteria World Bank Tahun 2013.....	68
Tabel L.13.	Karakteristik Perumahan Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 .....	69
Tabel L.14.	Karakteristik Sosial Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 .....	71
Tabel L.15.	Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Penerima Bantuan di Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 .....	72

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.	Koefisien Gini Menurut Kurva Lorenz .....	23
Gambar 4.1.	Perkembangan Garis Kemiskinan di Provinsi Maluku Utara, Tahun 2009-2013 .....	27
Gambar 4.2.	Perkembangan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2011-2013 .....	28
Gambar 4.3.	Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Maluku Utara, Tahun 2009-2013 .....	29
Gambar 4.4.	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Maluku Utara Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2011-2013 .....	30
Gambar 4.5.	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Maluku Utara, Tahun 2009-2013 .....	31
Gambar 4.6.	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Maluku Utara Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2011-2013 .....	32
Gambar 4.7.	Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Maluku Utara, Tahun 2009-2013 .....	33
Gambar 4.8.	Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Maluku Utara Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2011-2013 .....	34
Gambar 4.9.	Perkembangan Koefisien Gini Maluku Utara, Tahun 2009- 2013 .....	36
Gambar 4.10.	Perkembangan Koefisien Gini Maluku Utara Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2011-2013 .....	37
Gambar 4.11.	Distribusi Pengeluaran Penduduk Maluku Utara Tahun 2013 .	38

Gambar 5.1.	Perbandingan Karakteristik Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin di Provinsi Maluku Utara, Tahun 2013 .....	40
Gambar 5.2.	Jenis Atap Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin di Provinsi Maluku Utara, Tahun 2013 .....	42
Gambar 5.3.	Jenis Dinding Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin di Provinsi Maluku Utara, Tahun 2013 .....	43
Gambar 5.4.	Jenis Lantai Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin di Provinsi Maluku Utara, Tahun 2013 .....	44
Gambar 5.5.	Sumber Penerangan Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin di Provinsi Maluku Utara, Tahun 2013 .....	45
Gambar 5.6.	Ketersediaan Air Bersih Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin di Provinsi Maluku Utara, Tahun 2013 .....	46
Gambar 5.7.	Sumber Air Minum Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin di Provinsi Maluku Utara, Tahun 2013 .....	47
Gambar 5.8.	Cara Memperoleh Sumber Air Minum Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin di Provinsi Maluku Utara, Tahun 2013 .....	47
Gambar 5.9.	Jenis Jamban Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin di Provinsi Maluku Utara, Tahun 2013 .....	48
Gambar 5.10.	Bahan Bakar Utama Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin di Provinsi Maluku Utara, Tahun 2013 .....	49
Gambar 5.11.	Sumber Penghasilan Utama Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Menurut Sektor di Provinsi Maluku Utara, Tahun 2013 .....	50

Gambar 5.12. Sumber Penghasilan Utama Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Menurut Status di Provinsi Maluku Utara, Tahun 2013	51
Gambar 5.13. Kemampuan Membaca dan Menulis Kepala Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin di Provinsi Maluku Utara, Tahun 2013 .....	52
Gambar 5.14. Pendidikan Tertinggi Kepala Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin di Provinsi Maluku Utara, Tahun 2013 .....	53
Gambar 5.15. Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Penerima Raskin dan Beasiswa di Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 ....	55

<http://malut.bps.go.id>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di daerah manapun. Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat waktu. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

Badan Pusat Statistik (BPS) sudah melakukan penghitungan jumlah penduduk miskin secara periodik setiap tiga tahun sejak tahun 1984, dan penyajiannya sampai level provinsi baru dimulai tahun 1990. Sejak tahun 2003, BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin setiap tahun sampai level provinsi. Hal ini bisa terwujud karena sejak tahun 2003 BPS mengumpulkan data Susenas Panel Modul Konsumsi setiap bulan Maret. Selanjutnya mulai tahun 2011 dengan dilaksanakannya Susenas secara triwulanan (Maret, Juni, September, dan Desember), BPS mulai menyajikan data kemiskinan untuk level kabupaten/kota meskipun untuk karakteristik rumah tangga miskin hanya dapat disajikan pada tingkat provinsi.

## **1.2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup analisis mencakup tingkat kemiskinan pada Provinsi Maluku Utara menurut kabupaten/kota pada tahun 2013. Analisis ini juga menyajikan karakteristik rumah tangga miskin dan tidak miskin, distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk, serta beberapa indikator kemiskinan lainnya.

## **1.3. Data yang Digunakan**

Sumber data yang digunakan adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi dan Kor pada tahun 2013, dari triwulan I (Maret) hingga triwulan IV (Desember). Data dari keempat triwulan ini digabungkan sehingga diperoleh sampel sebanyak 3.711 rumah tangga untuk wilayah Provinsi Maluku Utara. Data Susenas gabungan tersebut dipergunakan untuk estimasi kemiskinan menurut kabupaten/kota serta analisis karakteristik rumah tangga miskin untuk tingkat provinsi.

## **BAB II**

### **KAJIAN LITERATUR**

#### **2.1. Definisi Kemiskinan**

##### **2.1.1. Kemiskinan Relatif**

Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu daerah pada waktu tertentu dan perhatian terfokus pada golongan penduduk “termiskin”, misalnya 20 persen atau 40 persen lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan/pengeluaran. Kelompok ini merupakan penduduk relatif miskin. Dengan demikian, ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk sehingga dengan menggunakan definisi ini berarti “orang miskin selalu hadir bersama kita”.

Tatkala negara atau daerah menjadi lebih kaya (sejahtera), negara atau daerah tersebut cenderung merevisi garis kemiskinannya menjadi lebih tinggi. Misalnya, Uni Eropa umumnya mendefinisikan penduduk miskin adalah mereka yang mempunyai pendapatan per kapita di bawah 50 persen dari median (rata-rata) pendapatan. Ketika median/rata-rata pendapatan meningkat, garis kemiskinan relatif juga meningkat.

Dalam hal mengidentifikasi dan menentukan sasaran penduduk miskin, maka garis kemiskinan relatif cukup untuk digunakan, dan perlu disesuaikan terhadap tingkat pembangunan daerah secara keseluruhan. Garis kemiskinan

relatif tidak dapat dipakai untuk membandingkan tingkat kemiskinan antar daerah dan waktu karena tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sama.

### **2.1.2. Kemiskinan Absolut**

Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum ini diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin.

Garis kemiskinan absolut “tetap (tidak berubah)” dalam hal standar hidup. Garis kemiskinan absolut mampu membandingkan kemiskinan secara umum. Garis kemiskinan Amerika Serikat tidak berubah dari tahun ke tahun, sehingga angka kemiskinan sekarang mungkin terbanding dengan angka kemiskinan satu dekade yang lalu, dengan catatan bahwa definisi kemiskinan tidak berubah.

Garis kemiskinan absolut sangat penting jika seseorang akan mencoba menilai efek dari kebijakan anti kemiskinan antar waktu, atau memperkirakan dampak dari suatu proyek terhadap kemiskinan (misalnya, pemberian kredit skala kecil). Angka kemiskinan akan terbanding antara satu daerah dengan daerah lain hanya jika garis kemiskinan absolut yang sama digunakan di kedua daerah tersebut. Bank Dunia memerlukan garis kemiskinan absolut agar dapat membandingkan angka kemiskinan antar negara. Hal ini bermanfaat dalam menentukan ke mana menyalurkan sumber daya finansial (dana) yang ada, juga dalam menganalisis kemajuan dalam memerangi kemiskinan.

Pada umumnya ada dua ukuran yang digunakan oleh Bank Dunia, yaitu: a) US \$ 1 per kapita per hari, di mana diperkirakan ada sekitar 1,2 miliar penduduk dunia yang hidup di bawah ukuran tersebut; b) US \$ 2 per kapita per hari, di mana lebih dari 2 miliar penduduk yang hidup kurang dari batas tersebut. US \$ yang digunakan adalah US \$ PPP (*Purchasing Power Parity*), bukan nilai tukar resmi (*exchange rate*). Kedua batas ini adalah garis kemiskinan absolut.

### **2.1.3. Terminologi Kemiskinan Lainnya**

Terminologi lain yang juga pernah dikemukakan sebagai wacana adalah kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Soetandyo Wignjosoebroto dalam “Kemiskinan Struktural: Masalah dan Kebijakan” yang dirangkum oleh Suyanto (1995) mendefinisikan “Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang ditengarai atau didalihkan bersebab dari kondisi struktur, atau tatanan kehidupan yang tak menguntungkan”. Dikatakan tak menguntungkan karena tatanan itu tak hanya menerbitkan, tetapi (lebih lanjut dari itu) juga melanggengkan kemiskinan di dalam masyarakat.

Di dalam kondisi struktur yang demikian itu, kemiskinan menggejala bukan oleh sebab-sebab yang alami atau oleh sebab-sebab yang pribadi, melainkan oleh sebab tatanan sosial yang tak adil. Tatanan yang tak adil ini menyebabkan banyak warga masyarakat gagal memperoleh peluang dan/atau akses untuk mengembangkan dirinya serta meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga mereka yang malang dan terperangkap ke dalam perlakuan yang tidak adil ini menjadi serba berkekurangan, tak setara dengan tuntutan untuk hidup yang layak dan bermartabat sebagai manusia. Misalnya penduduk Maluku Utara yang tinggal di pulau-pulau terluar atau mendekati pulau terluar.

Adapun kemiskinan kultural diakibatkan oleh faktor-faktor adat dan budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang tetap melekat dengan indikator kemiskinan. Padahal indikator kemiskinan tersebut seyogianya bisa dikurangi atau bahkan secara bertahap bisa dihilangkan dengan mengabaikan faktor-faktor adat dan budaya tertentu yang menghalangi seseorang melakukan perubahan-perubahan ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik. Kemiskinan karena tradisi sosio-kultural terjadi pada suku-suku terasing, seperti halnya yang dialami oleh orang-orang Suku Laut.

Soetandyo Wignjosebroto dalam “Kemiskinan, Kebudayaan, dan Gerakan Membudayakan Keberdayaan” yang dirangkum oleh Suyanto (1995) mendefinisikan, “Kemiskinan adalah suatu ketidak-berdayaan”. Keberdayaan itu sesungguhnya merupakan fungsi kebudayaan. Artinya, berdaya tidaknya seseorang dalam kehidupan bermasyarakat dalam kenyataannya akan banyak ditentukan dan dipengaruhi oleh determinan-determinan sosial-budayanya (seperti posisi, status, dan wawasan yang dipunyainya). Sebaliknya, semua fasilitas sosial yang teraih dan dapat didayagunakan olehnya, akan ikut pula menentukan keberdayaannya kelak di dalam pengembangan dirinya di tengah masyarakat. Acapkali timbul suatu rasa pesimis di kalangan orang miskin dengan merasionalisasi keadaannya bahwa hal itu “sudah takdir”, dan bahwa setiap orang itu sesungguhnya sudah mempunyai suratan nasibnya sendiri-sendiri, yang mestinya malah harus disyukuri. Oleh karena itu, Soetandyo menyarankan ditingkatkannya “Gerakan Membudayakan Keberdayaan” pada lapisan masyarakat bawah. Melek huruf, melek bahasa, melek fasilitas, melek ilmu, melek informasi, melek hak, dan melek-melek lainnya adalah suatu keberdayaan yang harus terus dimungkinkan kepada lapisan-lapisan masyarakat bawah agar tidak terjebak ke dalam kemiskinan kultural.

## **2.2. Pendekatan Penghitungan Kemiskinan**

### **2.2.1. Pendekatan Pendapatan/Pengeluaran**

Strategi kebutuhan dasar (basic needs), sebagaimana dikutip oleh Thee Kian Wie (1981), dipromosikan dan dipopulerkan oleh International Labor Organisation (ILO) pada tahun 1976 dengan judul “Kesempatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kebutuhan Dasar: Suatu Masalah bagi Satu Dunia”. Strategi kebutuhan dasar memang memberi tekanan pada pendekatan langsung dan bukan cara tidak langsung seperti melalui efek menetes ke bawah (trickle-down effect) dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kesulitan umum dalam penentuan indikator kebutuhan dasar adalah standar atau kriteria yang subjektif karena dipengaruhi oleh adat, budaya, daerah, dan kelompok sosial. Di samping itu, kesulitan penentuan secara kuantitatif dari masing-masing komponen kebutuhan dasar karena dipengaruhi oleh sifat yang dimiliki oleh komponen itu sendiri, misalnya selera konsumen terhadap suatu jenis makanan atau komoditi lainnya.

Beberapa kelompok atau ahli telah mencoba merumuskan mengenai konsep kebutuhan dasar ini termasuk alat ukurnya. Konsep kebutuhan dasar yang dicakup adalah komponen kebutuhan dasar dan karakteristik kebutuhan dasar serta hubungan keduanya dengan garis kemiskinan.

Rumusan komponen kebutuhan dasar menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

1. Menurut United Nations (1961), sebagaimana dikutip oleh Hendra Esmara (1986), komponen kebutuhan dasar terdiri atas: kesehatan, bahan makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja dan kondisi

pekerjaan, perumahan, sandang, rekreasi, jaminan sosial, dan kebebasan manusia.

2. Menurut UNSRID (1966), sebagaimana dikutip oleh Hendra Esmara (1986), komponen kebutuhan dasar terdiri atas: (i) kebutuhan fisik primer yang mencakup kebutuhan gizi, perumahan, dan kesehatan; (ii) kebutuhan kultural yang mencakup pendidikan, rekreasi dan ketenangan hidup; dan (iii) kebutuhan atas kelebihan pendapatan.
3. Menurut Ganguli dan Gupta (1976), sebagaimana dikutip oleh Hendra Esmara (1986), komponen kebutuhan dasar terdiri atas: gizi, perumahan, pelayanan kesehatan pengobatan, pendidikan, dan sandang.
4. Menurut Green (1978), sebagaimana dikutip oleh Thee Kian Wie (1981), komponen kebutuhan dasar terdiri atas: (i) personal consumption items yang mencakup pangan, sandang, dan pemukiman; (ii) basic public services yang mencakup fasilitas kesehatan, pendidikan, saluran air minum, pengangkutan, dan kebudayaan.
5. Menurut Hendra Esmara (1986), komponen kebutuhan dasar primer untuk bangsa Indonesia mencakup pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.
6. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), komponen kebutuhan dasar terdiri dari pangan dan bukan pangan yang disusun menurut daerah perkotaan dan perdesaan berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Indikator kebutuhan minimum untuk masing-masing komponen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pangan, dinyatakan dengan kebutuhan gizi minimum yaitu perkiraan kalori dan protein.
- b. Sandang, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk keperluan pakaian, alas kaki, dan tutup kepala.
- c. Perumahan, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk sewa rumah, listrik, minyak tanah, kayu bakar, arang, dan air.
- d. Pendidikan, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk keperluan biaya sekolah (uang sekolah, iuran sekolah, alat tulis, dan buku).
- e. Kesehatan, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk penyediaan obat-obatan di rumah, ongkos dokter, perawatan, termasuk obat-obatan.

### **2.2.2. Pendekatan Rata-rata Per Kapita**

Pendekatan rata-rata per kapita yang diterapkan dalam penghitungan kemiskinan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Biasanya pendekatan rata-rata per kapita ini belum mempertimbangkan tingkat konsumsi menurut golongan umur dan jenis kelamin serta skala ekonomi dalam konsumsi. Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan sebesar 1 dolar dalam bentuk satuan PPP per kapita per hari, sedangkan negara maju seperti Eropa Barat menetapkan 1/3 dari nilai PDB per kapita per tahun sebagai garis kemiskinan. Untuk kasus Indonesia, garis kemiskinan didekati dengan pengeluaran minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari ditambah pengeluaran minimum bukan makanan (perumahan dan fasilitasnya, sandang, kesehatan, pendidikan, transpor, dan barang-barang lainnya).

**Tabel 2.1. Beberapa Kriteria dan Garis Kemiskinan**

No. Urut	Penelitian	Kriteria	Garis Kemiskinan		
			Kota	Desa	K + D
1.	Esmara, 1969/1970 *)	Konsumsi beras per kapita per tahun (kg)	-	-	125
2.	Sayogya, 1971 *)	Tingkat Pengeluaran ekuivalen beras per orang per tahun (kg) - Miskin (M) - Miskin Sekali (MS) - Paling Miskin (PM)	480 360 270	320 240 180	- - -
3.	Ginneken, 1969 *)	Kebutuhan gizi minimum per orang per hari - Kalori - Protein (gram)	- -	- -	2.000 50
4.	Anne Booth, 1969/1970 *)	Kebutuhan gizi minimum per orang per hari - Kalori - Protein (gram)	- -	- -	2.000 40
5.	Gupta, 1973 *)	Kebutuhan gizi minimum per orang per tahun	-	-	24.000
6.	Hasan, 1975 *)	Pendapatan minimum per kapita/tahun (US \$)	125	95	-
7.	BPS, 1984	1. Konsumsi kalori per kapita per hari 2. Pengeluaran per kapita per bulan (Rp)	- 13.731	- 7.746	2.100 -
8.	Sayogya, 1984	Pengeluaran per kapita per bulan (Rp)	8.240	6.585	-
9.	Bank Dunia, 1984	Pengeluaran per kapita per bulan (Rp)	6.719	4.479	-
10.	Garis kemiskinan internasional, Interim Report, 1976	Pendapatan per kapita per tahun : - Nilai US \$, 1970 - US \$ Paritas daya beli	- -	- -	75 200
11.	Garis kemiskinan internasional, Ahluwalia, 1975 **)	Tingkat pendapatan per kapita per tahun (US \$)			50 75
12.	Rekomendasi dari FAO dan WHO di Roma Tahun 2001 ***)	Batas minimal kalori sesuai kebutuhan manusia untuk mampu bertahan hidup dan bekerja (kkal)	-	-	2100

Keterangan:

\*) Hendra Esmara: Perencanaan dan Pembangunan di Indonesia, PT Gramedia, Jakarta: 1986.

\*\*) Montek S. Ahluwalia, Income Inequality: Some Dimensions of The Problem, dalam Hollis Chenery: Redistribution with Growth, London: University Press, 1974 hlm. 6-10; seperti dikutip oleh Soemitro Djojohadikusumo dalam Prisma no. 2 tahun IV (April 1975), hlm. 24.

\*\*\*) Jausairi Hasbullah: Tangguh Dengan Statistik, Nuansa Cendekia, Bandung : 2012, hlm. 83.

### **2.2.3. Pendekatan BKKBN**

Salah satu penerapan konsep dan definisi kemiskinan pernah dilakukan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 1999 dengan melakukan pendataan keluarga secara lengkap. Pendataan keluarga tersebut menggunakan konsep/pendekatan kesejahteraan keluarga. BKKBN membagi kriteria keluarga ke dalam lima tahapan, yaitu Keluarga Pra Sejahtera (Pra-KS), Keluarga Sejahtera I (KS I), Keluarga Sejahtera II (KS II), Keluarga Sejahtera III (KS III), dan Keluarga Sejahtera III Plus (KS III-Plus).

Menurut BKKBN, kriteria keluarga yang dikategorikan sebagai keluarga miskin adalah Keluarga Pra Sejahtera (Pra-KS) dan Keluarga Sejahtera I (KS I). Ada lima indikator yang harus dipenuhi agar suatu keluarga dikategorikan sebagai Keluarga Sejahtera I, yaitu sebagai berikut:

1. Anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianut masing-masing.
2. Seluruh anggota keluarga pada umumnya makan 2 kali sehari atau lebih.
3. Seluruh anggota keluarga mempunyai pakaian yang berbeda di rumah, sekolah, bekerja, dan bepergian.
4. Bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah.
5. Bila anak sakit atau PUS (Pasangan Usia Subur) ingin mengikuti KB, pergi ke sarana/petugas kesehatan serta diberi cara KB modern.

Mereka yang dikategorikan sebagai Keluarga Pra-Sejahtera adalah keluarga-keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 5 (lima) indikator di atas.

Pendekatan BKKBN ini dianggap masih kurang realistis karena konsep keluarga Pra Sejahtera dan KS I sifatnya normatif dan lebih sesuai dengan

keluarga kecil/inti. Selain itu, kelima indikator tersebut masih bersifat sentralistik dan seragam yang belum tentu relevan dengan keadaan dan budaya lokal.

## **2.2.4. Pendekatan BPS Berdasarkan SPKPM 2000**

Pada tahun 2000, BPS melakukan Studi Penentuan Kriteria Penduduk Miskin (SPKPM 2000) untuk mengetahui karakteristik-karakteristik rumah tangga yang mampu mencirikan kemiskinan secara konseptual (pendekatan kebutuhan dasar/garis kemiskinan). Hal ini menjadi sangat penting karena pengukuran makro (basic needs) tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi rumah tangga/penduduk miskin di lapangan. Informasi ini berguna untuk penentuan sasaran rumah tangga program pengentasan kemiskinan (intervensi program). Cakupan wilayah studi meliputi tujuh provinsi, yaitu Sumatera Selatan, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan.

Dari hasil SPKPM 2000 tersebut, diperoleh 8 variabel yang dianggap layak dan operasional untuk penentuan rumah tangga miskin di lapangan. Skor 1 mengacu kepada sifat-sifat yang mencirikan kemiskinan dan skor 0 mengacu kepada sifat-sifat yang mencirikan ketidakkemiskinan. Kedelapan variabel tersebut adalah sebagai berikut.

1. Luas Lantai Per Kapita:
  - $\leq 8$  m<sup>2</sup> (skor 1)
  - $> 8$  m<sup>2</sup> (skor 0)
2. Jenis Lantai:
  - Tanah (skor 1)
  - Bukan Tanah (skor 0)

3. Air Minum/Ketersediaan Air Bersih:
  - Air hujan/sumur tidak terlindung (skor 1)
  - Ledeng/PAM/sumur terlindung (skor 0)
4. Jenis Jamban/WC:
  - Tidak Ada (skor 1)
  - Bersama/Sendiri (skor 0)
5. Kepemilikan Asset:
  - Tidak Punya Asset (skor 1)
  - Punya Asset (skor 0)
6. Pendapatan (total pendapatan per bulan):
  - $\leq 350.000$  (skor 1)
  - $> 350.000$  (skor 0)
7. Pengeluaran (persentase pengeluaran untuk makanan):
  - 80 persen + (skor 1)
  - $< 80$  persen (skor 0)
8. Konsumsi lauk pauk (daging, ikan, telur, ayam):
  - Tidak ada/ada, tapi tidak bervariasi (skor 1)
  - Ada, bervariasi (skor 0)

Kedelapan variabel tersebut diperoleh dengan menggunakan metode *stepwise logistic regression* dan misklasifikasi yang dihasilkan sekitar 17 persen. Hasil analisis deskriptif dan uji *Chi-Square* juga menunjukkan bahwa kedelapan variabel terpilih tersebut sangat terkait dengan fenomena kemiskinan dengan tingkat kepercayaan sekitar 99 persen. Skor batas yang digunakan adalah 5 (lima) yang didasarkan atas modus total skor dari domain rumah tangga miskin secara konseptual. Sehingga rumah tangga yang mempunyai minimal 5 (lima) ciri miskin, maka rumah tangga tersebut digolongkan sebagai rumah tangga miskin.

### **2.2.5. Pendekatan BPS Berdasarkan PSE05**

Data kemiskinan yang selama ini dihitung dari Susenas merupakan data makro berupa perkiraan penduduk miskin di Indonesia. Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005 (PSE05) dimaksudkan untuk mendapatkan data kemiskinan mikro berupa direktori rumah tangga menerima BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang berisi nama kepala rumah tangga dan alamat tempat tinggal mereka. Berbeda dengan data kemiskinan makro, penentuan rumah tangga penerima BLT pada PSE05 didasarkan pada pendekatan karakteristik rumah tangga, bukan dengan pendekatan nilai konsumsi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum (*non-monetary approach*).

Adapun indikator yang digunakan ada sebanyak 14 variabel, yaitu :

1. Luas lantai rumah
2. Jenis lantai rumah
3. Jenis dinding rumah
4. Fasilitas tempat buang air besar
5. Sumber air minum
6. Penerangan yang digunakan
7. Bahan bakar yang digunakan
8. Frekuensi makan dalam sehari
9. Kebiasaan membeli daging/ayam/susu
10. Kemampuan membeli pakaian
11. Kemampuan berobat ke puskesmas/poliklinik
12. Lapangan pekerjaan kepala rumah tangga
13. Pendidikan kepala rumah tangga
14. Kepemilikan aset.

Metode yang digunakan dalam penentuan kategori rumah tangga penerima BLT adalah dengan menggunakan sistem skoring, di mana setiap variabel diberi skor yang diberi bobot dan bobotnya didasarkan kepada besarnya pengaruh dari setiap variabel terhadap kemiskinan. Jumlah variabel dan besarnya bobot berbeda di setiap kabupaten. Dari bobot masing-masing variabel terpilih untuk tiap kabupaten/kota selanjutnya dihitung indeks skor rumah tangga penerima BLT dari hasil PSE05 dengan formula:

$$I_{RM} = \sum W_i X_i$$

di mana:

$W_i$  = bobot variabel terpilih, dan  $\sum W_i = 1$

$X_i$  = nilai skor variabel terpilih (skor 1 untuk jawaban yang mengindikasikan miskin dan skor 0 untuk jawaban yang mengindikasikan tidak miskin).

$I_{RM}$  = indeks rumah tangga penerima BLT, dengan nilai antara 0 dan 1.

Berdasarkan nilai  $I_{RM}$  diatas, selanjutnya semua rumah tangga diurutkan dari nilai  $I_{RM}$  terbesar sampai terkecil. Semakin tinggi nilai  $I_{RM}$  maka semakin miskin rumah tangga tersebut.

## **BAB III**

### **METODOLOGI**

#### **3.1. Penghitungan Kemiskinan**

##### **3.1.1. Konsep**

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

##### **3.1.2. Sumber Data**

Sumber data utama yang dipakai adalah data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) Modul Konsumsi dan Kor yang dilaksanakan pada triwulan I hingga triwulan IV tahun 2013.

##### **3.1.3. Metode**

Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM), sehingga:  $GK = GKM + GKNM$ .

Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk masing-masing provinsi daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak, dan lemak, dll).

Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perkotaan dan 47 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perdesaan.

### **3.1.4. Teknik Penghitungan Garis Kemiskinan**

Tahap pertama adalah menentukan penduduk referensi, yaitu 20 persen penduduk yang berada di atas Garis Kemiskinan Sementara. Garis Kemiskinan Sementara yaitu Garis Kemiskinan periode lalu yang di-inflate dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

Garis kemiskinan makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita perhari. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Formula dasar dalam menghitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah:

$$GKM_{jp} = \sum_{k=1}^{52} P_{jkp} \cdot Q_{jkp} = \sum_{k=1}^{52} V_{jkp}$$

di mana:

$GKM_{jp}$  = Garis Kemiskinan Makanan daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2.100 kilokalori) provinsi p.

$P_{jkp}$  = Harga komoditi k di daerah j dan provinsi p.

$Q_{jkp}$  = Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j di provinsi p.

$V_{jkp}$  = Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j provinsi p.

j = Daerah (perkotaan atau perdesaan).

p = Provinsi ke-p.

Selanjutnya,  $GKM_j$  tersebut disetarakan dengan 2.100 kilokalori dengan mengalikan 2.100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah j dari penduduk referensi, sehingga:

$$HK_{jp} = \frac{\sum_{k=1}^{52} V_{jkp}}{\sum_{k=1}^{52} Q_{jkp}}$$

di mana:

$K_{jkp}$  = kalori dari komoditi k di daerah j provinsi p.

$HK_{jp}$  = harga rata-rata kalori di daerah j provinsi p.

$$GKM_{jp} = HK_{jp} \times 2.100$$

di mana:

GKM = Kebutuhan minimum makanan di daerah j, yaitu yang menghasilkan energi setara dengan 2.100 kilokalori/kapita/hari atau Garis Kemiskinan Makanan (GKM)

j = Daerah (perkotaan/perdesaan)

p = Provinsi p

Garis kemiskinan non-makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Nilai kebutuhan minimum per komoditi/sub-kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 (SPKKD 2004), yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non-makanan yang lebih rinci dibandingkan data Susenas modul konsumsi. Nilai kebutuhan minimum non-makanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$GKNM_{jp} = \sum_{k=1}^n r_{kj} V_{kjp}$$

di mana:

$GKNM_{jp}$  = Pengeluaran minimum non-makanan atau garis kemiskinan non-makanan daerah j (kota/desa) dan provinsi p.

$V_{kjp}$  = Nilai pengeluaran per komoditi/sub-kelompok non-makanan daerah j dan provinsi p (dari Susenas modul konsumsi).

$r_{kj}$  = Rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok non-makanan k menurut daerah (hasil SPKKD 2004) dan daerah j (kota+desa).

k = Jenis komoditi non-makanan terpilih.

J = Daerah (perkotaan atau perdesaan).

p = Provinsi (perkotaan atau perdesaan).

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Penduduk yang

memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin (PM). Persentase penduduk miskin di suatu kabupaten/kota dihitung dengan:

$$\%PM_k = \frac{PM_k}{P_k}$$

di mana:

$\%PM_k$  = % Penduduk miskin di kabupaten/kota k.

$PM_k$  = Jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota k.

$P_k$  = Jumlah penduduk di kabupaten/kota k.

Sementara itu, penduduk miskin untuk level provinsi merupakan jumlah dari penduduk miskin kabupaten/kota atau:

$$PM_p = \sum_{k=1}^n PM_k$$

di mana:

$PM_p$  = Penduduk miskin provinsi.

$PM_k$  = Penduduk miskin kabupaten/kota k.

$n$  = Jumlah kabupaten/kota.

Persentase penduduk miskin provinsi adalah:

$$\%PM_p = \frac{PM_p}{P_p}$$

di mana :

$\%PM_p$  = Persentase penduduk miskin provinsi.

$PM_p$  = Jumlah penduduk miskin provinsi.

$P_p$  = Jumlah penduduk provinsi.

### 3.2. Indikator Kemiskinan

Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada 3 indikator kemiskinan yang digunakan, yaitu:

- Pertama, *Head Count Index* (HCI =  $P_0$ ), yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).
- Kedua, Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index* =  $P_1$ ) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
- Ketiga, Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index* =  $P_2$ ) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Foster-Greer-Thorbecke (1984) telah merumuskan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan yaitu:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z-y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

di mana:

$$\alpha = 0, 1, 2$$

Jika  $\alpha=0$ , diperoleh *Head Count Index* ( $P_0$ ), jika  $\alpha=1$  diperoleh Indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index* =  $P_1$ ), jika  $\alpha=2$  disebut Indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index* =  $P_2$ ).

- z = Garis kemiskinan
- yi = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan dari penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (i = 1, 2, ..., q), yi < z
- q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan
- n = Jumlah penduduk

### 3.3. Distribusi dan Ketimpangan Pendapatan

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat karena pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relatif. Oleh karena data pendapatan sulit diperoleh, pengukuran distribusi pendapatan selama ini didekati dengan menggunakan data pengeluaran. Dalam hal ini, analisis distribusi pendapatan dilakukan dengan menggunakan data total pengeluaran rumah tangga sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari Susenas. Dalam analisis ini, akan digunakan dua ukuran untuk merefleksikan ketimpangan pendapatan yaitu koefisien Gini (Gini Ratio) dan Ukuran Bank Dunia.

#### 3.3.1. Koefisien Gini (*Gini Ratio*)

Koefisien Gini (*Gini Ratio*) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Rumus Koefisien Gini adalah sebagai berikut.

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n fp_i * (Fc_i + Fc_{i-1})$$

di mana:

GR = Koefisien Gini (Gini Ratio)

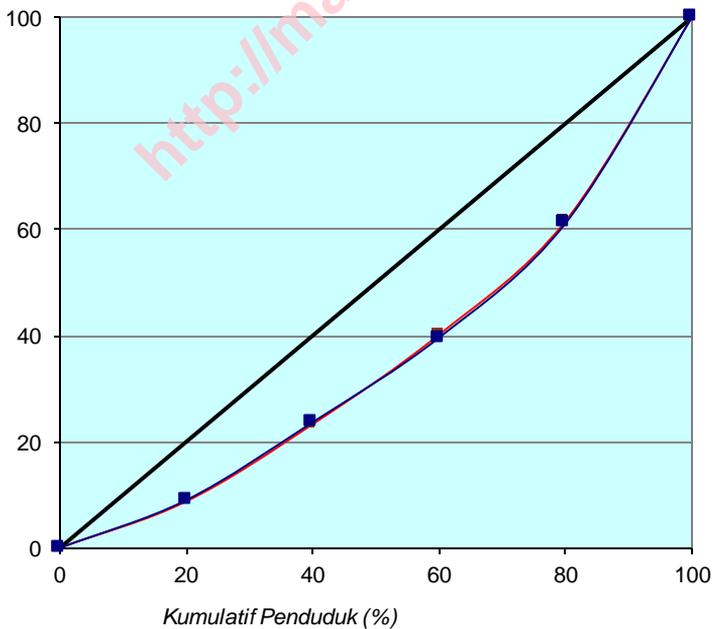
$f_{p_i}$  = frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i

$F_{c_i}$  = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i

$F_{c_{i-1}}$  = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-(i-1)

**Gambar 3.1. Koefisien Gini Menurut Kurva Lorenz**

*Kumulatif Pengeluaran (%)*



Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Untuk membentuk koefisien Gini, grafik persentase kumulatif penduduk (dari termiskin hingga terkaya) digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran (pendapatan) digambar pada sumbu vertikal. Ini menghasilkan kurva Lorenz seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.1. Garis diagonal mewakili pemerataan sempurna. Koefisien Gini didefinisikan sebagai  $A/(A+B)$ , dimana A dan B seperti yang ditunjukkan pada grafik. Jika  $A=0$  koefisien Gini bernilai 0 yang berarti pemerataan sempurna, sedangkan jika  $B=0$  koefisien Gini akan bernilai 1 yang berarti ketimpangan sempurna. Namun, pengukuran dengan menggunakan Koefisien Gini tidak sepenuhnya memuaskan.

Daimon dan Thorbecke (1999) berpendapat bahwa penurunan ketimpangan (perbaikan distribusi pendapatan) selalu tidak konsisten dengan bertambahnya insiden kemiskinan, kecuali jika terdapat dua aspek yang mendasari inkonsistensi tersebut.

- Pertama, variasi distribusi pendapatan dari kelas terendah meningkat secara drastis sebagai akibat krisis.
- Kedua, merupakan persoalan metodologi berkaitan dengan keraguan dalam pengukuran kemiskinan dan indikator ketimpangan.

Beberapa kriteria bagi sebuah ukuran ketimpangan yang baik misalnya sebagai berikut:

- Tidak tergantung pada nilai rata-rata (mean independence). Ini berarti bahwa jika semua pendapatan bertambah dua kali lipat, ukuran ketimpangan tidak akan berubah. Koefisien Gini memenuhi syarat ini.

- Tidak tergantung pada jumlah penduduk (*population size independence*). Jika penduduk berubah, ukuran ketimpangan seharusnya tidak berubah, kondisi lain tetap (*ceteris paribus*). Koefisien Gini juga memenuhi syarat ini.
- Simetris. Jika antar penduduk bertukar tempat tingkat pendapatannya, seharusnya tidak akan ada perubahan dalam ukuran ketimpangan. Koefisien Gini juga memenuhi hal ini.
- Sensitivitas Transfer Pigou-Dalton. Dalam kriteria ini, transfer pendapatan dari si kaya ke si miskin akan menurunkan ketimpangan. Gini juga memenuhi kriteria ini.

Ukuran ketimpangan yang baik juga diharapkan mempunyai sifat sebagai berikut:

- Dapat didekomposisi  
Hal ini berarti bahwa ketimpangan mungkin dapat didekomposisi (dipecah) menurut kelompok penduduk atau sumber pendapatan atau dalam dimensi lain. Indeks Gini tidak dapat didekomposisi atau tidak bersifat aditif antar kelompok, yakni nilai total koefisien Gini dari suatu masyarakat tidak sama dengan jumlah nilai indeks Gini dari sub-kelompok masyarakat (sub-group).
- Dapat diuji secara statistik  
Seseorang harus dapat menguji signifikansi perubahan indeks antar waktu. Hal ini sebelumnya menjadi masalah, tetapi dengan teknik *bootstrap interval* (selang) kepercayaan umumnya dapat dibentuk.

### **3.3.2. Ukuran Bank Dunia**

Bank Dunia mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan: 40 persen penduduk dengan pendapatan rendah, 40 persen penduduk dengan pendapatan menengah, dan 20 persen penduduk dengan pendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40 persen terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk.

Kategori ketimpangan ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut:

- Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi.
- Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12-17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang/menengah.
- Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah.

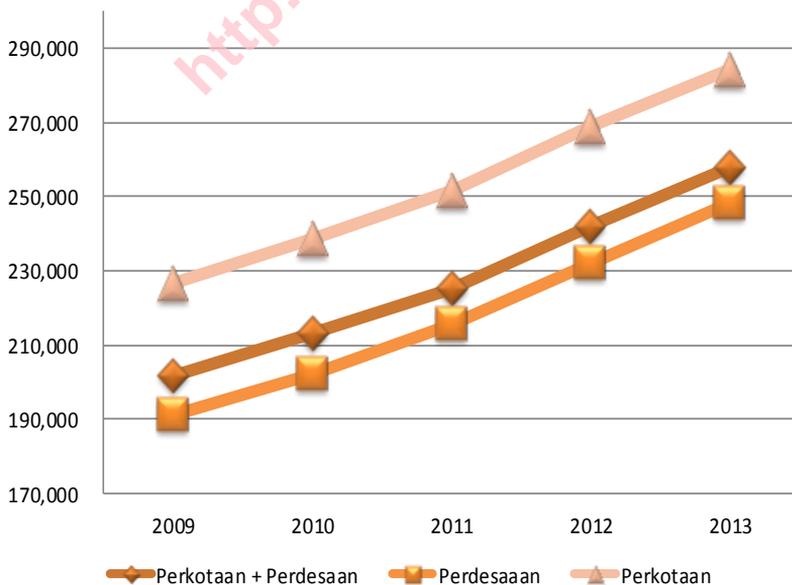
## BAB IV

### ULASAN TINGKAT KEMISKINAN PROVINSI MALUKU UTARA

#### 4.1. Garis Kemiskinan Provinsi Maluku Utara

Selama lima tahun terakhir, garis kemiskinan Provinsi Maluku Utara mengalami kenaikan, baik pada daerah perkotaan maupun perdesaan, tersaji pada Gambar 4.1. Hal ini salah satunya disebabkan oleh inflasi yang menyebabkan kenaikan harga komoditi pembentuk garis kemiskinan yang meliputi komoditi makanan dan komoditi non makanan.

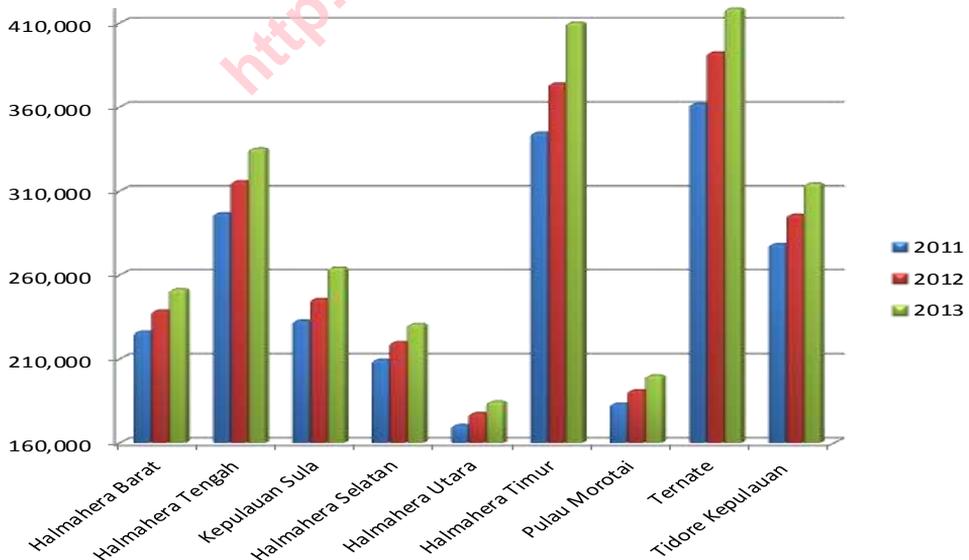
**Gambar 4.1. Perkembangan Garis Kemiskinan di Provinsi Maluku Utara, Tahun 2009-2013**



Garis kemiskinan di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2013 sebesar Rp258.060,- naik sebesar 6,59 persen dari tahun 2012. Pada daerah perkotaan tahun 2013 sebesar Rp.284.374,- naik sebesar 5,82 persen dari tahun 2012. Sedangkan pada daerah perdesaan, garis kemiskinan tahun 2013 sebesar Rp.248.026,- naik sebesar 6,86 persen dari tahun 2012. Selengkapnya tersaji dalam Tabel L.1.

Garis kemiskinan di daerah perdesaan lebih rendah daripada daerah perkotaan karena komoditi untuk penghitungan garis kemiskinan di daerah perdesaan lebih sedikit daripada daerah perkotaan. Selain itu, harga komoditi makanan di daerah perdesaan pada umumnya lebih murah dibandingkan di daerah perkotaan.

**Gambar 4.2. Perkembangan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2011-2013**

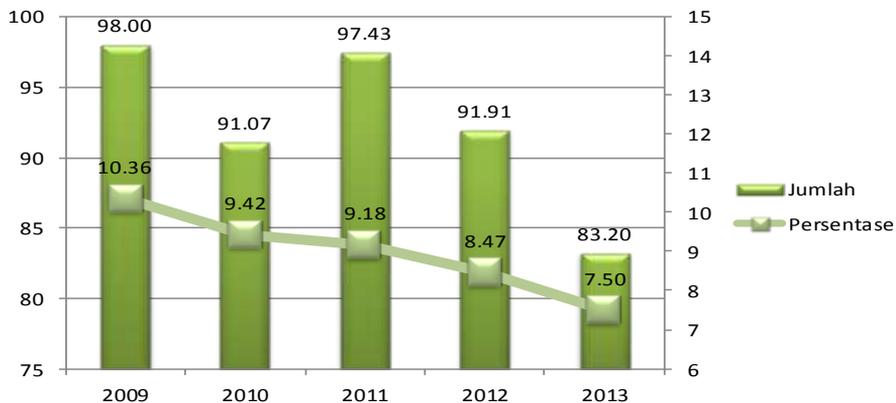


Seperti terlihat dalam Gambar 4.2, garis kemiskinan di Kota Ternate merupakan yang tertinggi di Maluku Utara, yaitu sebesar Rp.418.472,- sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp.184.492,-. Perbedaan garis kemiskinan tersebut disebabkan oleh perbedaan harga komoditi dalam penghitungan garis kemiskinan di masing-masing kabupaten/kota, baik komoditi makanan maupun non makanan. Perkembangan garis kemiskinan menurut kabupaten/kota tersaji dalam Tabel L.2.

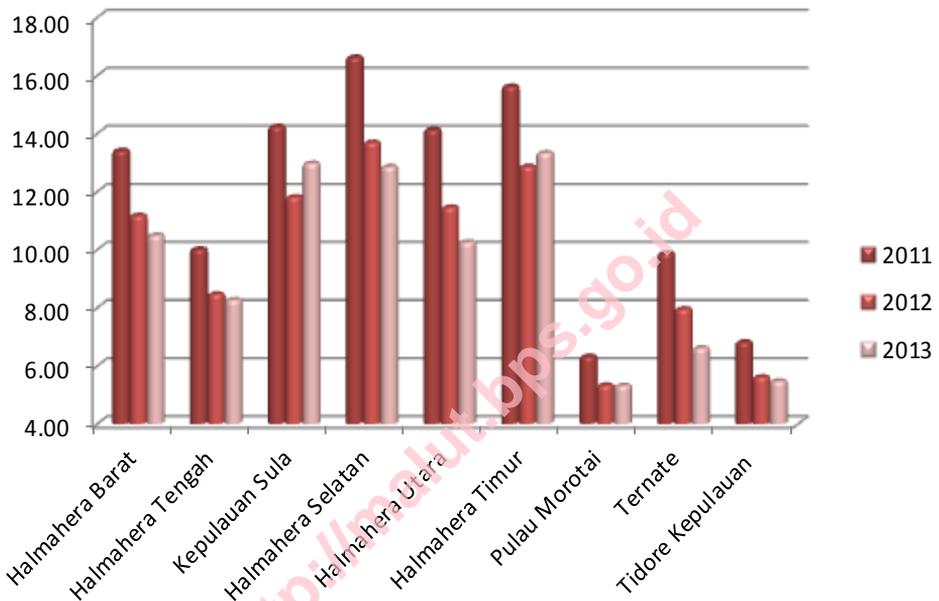
#### 4.2. Jumlah Penduduk Miskin

Perkembangan penduduk miskin Maluku Utara berdasarkan Susenas dalam lima tahun terakhir relatif menunjukkan penurunan, baik dari jumlah maupun persentase. Pada tahun 2009, jumlah penduduk miskin sekitar 98 ribu orang atau sebesar 10,36 persen penduduk Maluku Utara. Sedangkan pada tahun 2013, jumlah penduduk miskin sekitar 83 ribu orang atau sebesar 7,50 persen penduduk Maluku Utara. Selengkapnya tersaji dalam Tabel L.3 dan L.4.

**Gambar 4.3. Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Maluku Utara, Tahun 2009-2013**



**Gambar 4.4. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Maluku Utara Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011-2013**

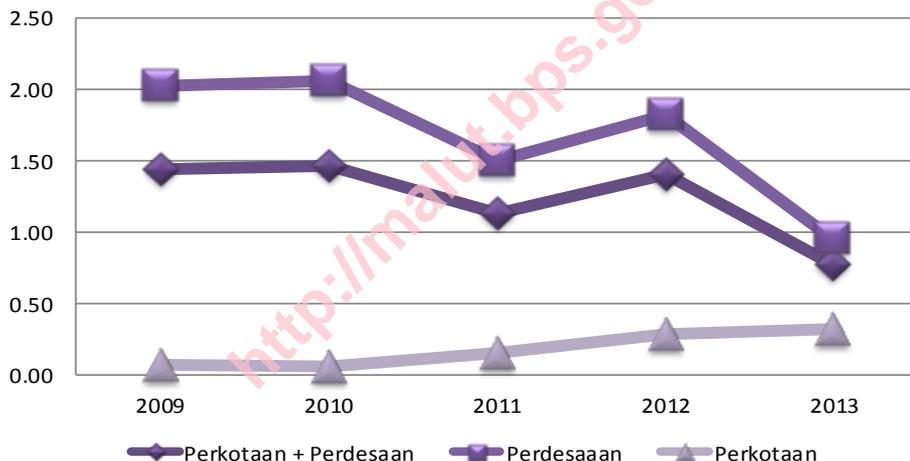


Selama tiga tahun terakhir, jumlah penduduk miskin di masing-masing kabupaten/kota umumnya mengalami penurunan, seperti terlihat pada Gambar 4.5. Kabupaten yang memiliki penduduk miskin terbanyak adalah Halmahera Timur yaitu sebanyak 13,33 ribu orang. Meskipun demikian, jumlah tersebut hanya 16,43 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Timur. Sedangkan kabupaten yang memiliki persentase penduduk miskin terbesar adalah Halmahera Tengah yaitu sebesar 17,44 persen, meskipun jumlahnya lebih sedikit dari Halmahera Timur, yaitu hanya sebanyak 8,27 ribu orang. Hal ini disebabkan karena jumlah penduduk di Halmahera Timur lebih banyak daripada di Halmahera Tengah. Selengkapnya tersaji dalam Tabel L.5 dan L.6.

### 4.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index = P<sub>1</sub>*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

**Gambar 4.5. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Maluku Utara, Tahun 2009-2013**

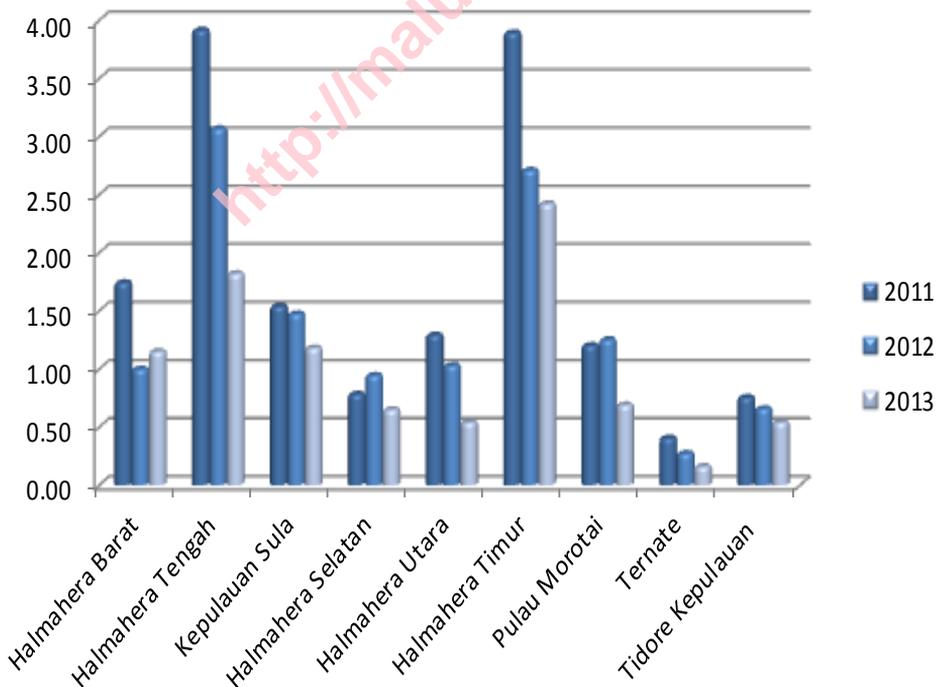


Secara umum indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Maluku Utara dalam lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menurun dari waktu ke waktu, yaitu dari 1,45 pada tahun 2009 menjadi 0,78 pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk miskin di Maluku Utara semakin mendekati garis kemiskinan sehingga semakin besar peluang untuk mengentaskannya dari kemiskinan. Pada daerah perkotaan, meskipun mengalami sedikit kenaikan indeks kedalaman kemiskinan, namun masih jauh dibawah indeks kedalaman

kemiskinan pada daerah perdesaan. Hal ini menunjukkan bahwa lebih mudah untuk mengentaskan kemiskinan pada daerah perkotaan, meskipun ada kecenderungan bahwa penduduk miskin di daerah perkotaan dari tahun ke tahun semakin sulit untuk dikeluarkan dari garis kemiskinan.

Pada tingkat kabupaten/kota, indeks kedalaman kemiskinan pada masing-masing kabupaten/kota cenderung mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir, seperti tersaji dalam Gambar 4.6.

**Gambar 4.6. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Maluku Utara Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011-2013**

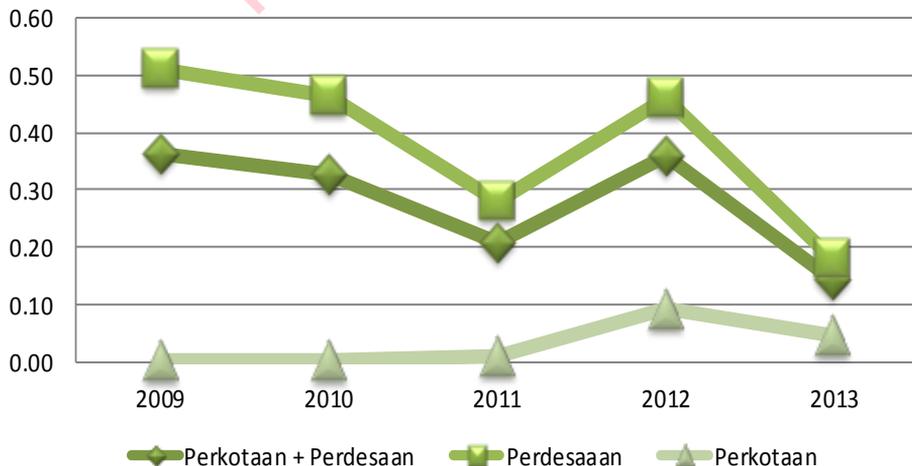


Kabupaten yang memiliki indeks kedalaman kemiskinan yang tertinggi adalah Halmahera Timur yaitu sebesar 2,42, sedangkan yang paling rendah adalah Kota Ternate, yaitu sebesar 0,16. Hal ini mengindikasikan bahwa lebih sulit untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Halmahera Timur daripada di Kota Ternate karena penduduk miskin di Halmahera Timur lebih jauh jaraknya dari garis kemiskinan. Selengkapnya pada Tabel L.8.

#### 4.4. Indeks Keparahan Kemiskinan

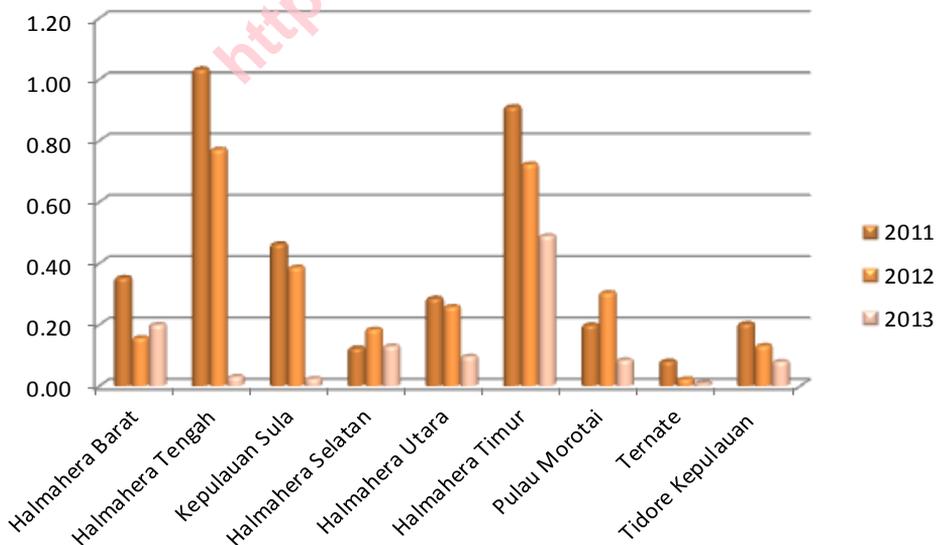
Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index = P<sub>2</sub>*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

**Gambar 4.7. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Maluku Utara, Tahun 2009-2013**



Dalam lima tahun terakhir, secara umum indeks keparahan kemiskinan di Provinsi Maluku Utara, yaitu dari 0,36 pada tahun 2009 menjadi 0,14 pada tahun 2013, seperti terlihat dalam Gambar 4.7. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin Maluku Utara semakin berkurang. Pada daerah perkotaan, meskipun mengalami sedikit kenaikan indeks keparahan kemiskinan, namun masih jauh dibawah indeks keparahan kemiskinan pada daerah perdesaan. Hal ini menunjukkan bahwa pola pengeluaran penduduk miskin pada daerah perkotaan cenderung lebih seragam dibandingkan daerah perdesaan yang lebih timpang, meskipun ada kecenderungan bahwa penduduk miskin di daerah perkotaan dari tahun ke tahun semakin mengalami ketimpangan pengeluaran di antara mereka.

**Gambar 4.8. Perkembangan Indeks Keparahhan Kemiskinan Maluku Utara Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011-2013**



Pada tingkat kabupaten/kota, indeks kedalaman kemiskinan pada masing-masing kabupaten/kota cenderung mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir, seperti tersaji dalam Gambar 4.8.

Kabupaten yang memiliki indeks keparahan kemiskinan yang tertinggi adalah Halmahera Timur yaitu sebesar 0,49, sedangkan yang paling rendah adalah Kota Ternate, yaitu sebesar 0,01. Hal ini mengindikasikan bahwa lebih ketimpangan kemiskinan di Kabupaten Halmahera Timur lebih besar daripada di Kota Ternate karena distribusi pengeluaran penduduk miskin di Halmahera Timur lebih beragam. Selengkapnya pada Tabel L.10.

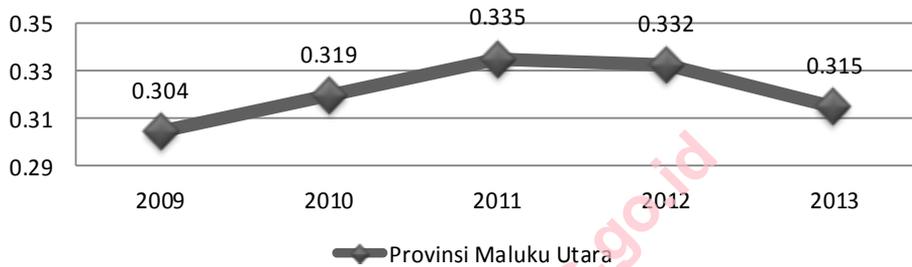
#### **4.5. Distribusi dan Ketimpangan Pengeluaran**

Untuk melihat distribusi pengeluaran penduduk sekaligus melihat bagaimana pemerataannya, salah satu ukuran atau indikator yang dapat digunakan adalah Gini Rasio. Dengan dihasilkannya angka Gini Rasio, akan terdeteksi bagaimana tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di suatu daerah. Nilai Gini Rasio selalu bekisar antara 0 dan 1. Jika nilai Gini Rasio di bawah 0,3, dapat dikatakan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk di suatu daerah tersebut rendah. Pada interval 0,3-0,5 dalam skala nilai Gini Rasio, ketimpangan pengeluaran penduduk di suatu daerah adalah sedang, sedangkan dikatakan ketimpangannya tinggi jika nilainya di atas 0,5.

Pada tahun 2013, nilai Gini Rasio Provinsi Maluku Utara sebesar 0,315, yang berarti ketimpangan pengeluaran penduduk Maluku Utara adalah sedang. Begitu juga dalam rentang tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, Maluku Utara termasuk dalam kategori ketimpangan sedang. Meskipun mengalami penurunan dari tahun 2012, akan tetapi nilai tersebut masih lebih tinggi daripada tahun

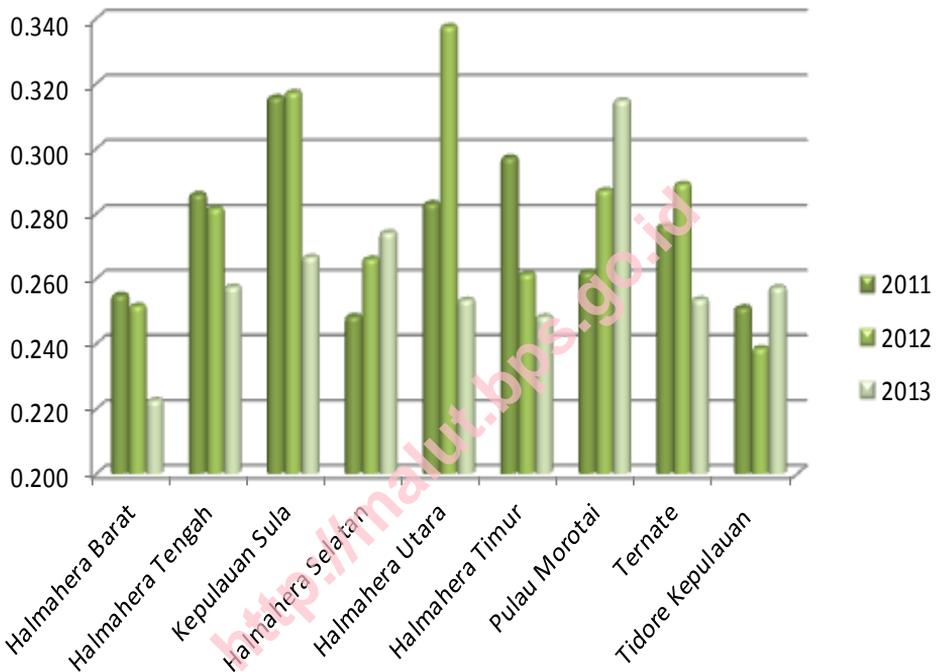
2009. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk Maluku Utara cenderung fluktuatif, seperti tersaji dalam Gambar 4.9.

**Gambar 4.9. Perkembangan Koefisien Gini Maluku Utara, Tahun 2009-2013**



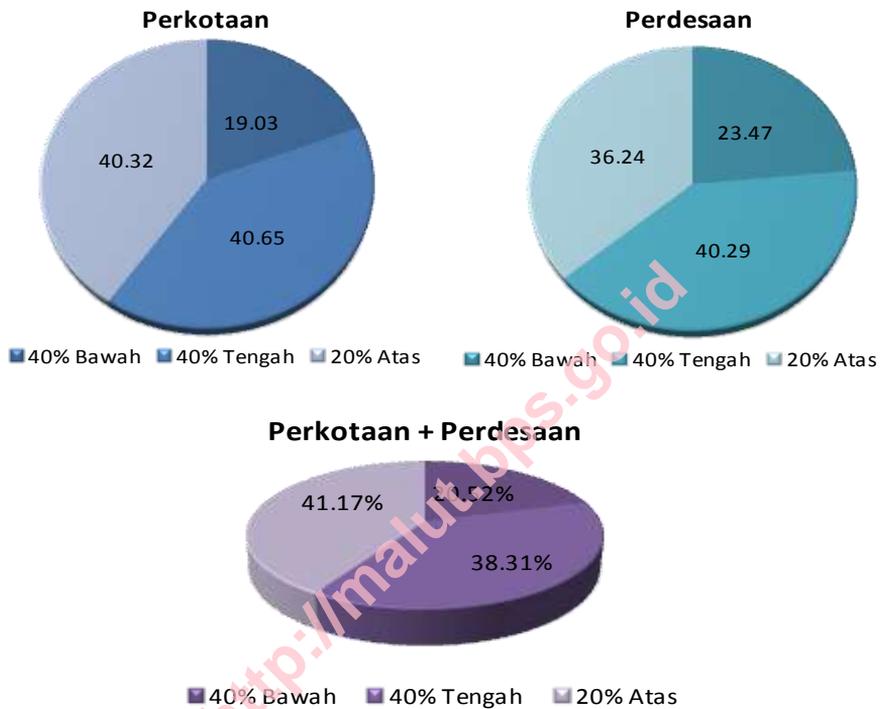
Dalam tiga tahun terakhir, kabupaten yang mengalami penurunan ketimpangan pengeluaran adalah Halmahera Barat, Halmahera Tengah dan Halmahera Timur. Hal ini menunjukkan bahwa jarak antara si kaya dan si miskin di ketiga kabupaten itu semakin mengecil. Sebaliknya, pada Kabupaten Halmahera Selatan dan Kepulauan Morotai jarak si kaya dan si miskin semakin lebar, ditunjukkan dengan kenaikan koefisien gini pada tiga tahun terakhir di kedua kabupaten tersebut. Sedangkan pada kabupaten/kota lainnya, ketimpangan pengeluarannya fluktuatif, seperti terlihat dalam Gambar 4.10. Meskipun demikian, indeks koefisien gini pada keempat kabupaten/kota tersebut terletak pada kategori rendah. Satu-satunya kabupaten yang memiliki koefisien gini pada kategori sedang di tahun 2013 adalah Kabupaten Kepulauan Morotai. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk kaya pada kabupaten tersebut memiliki andil yang lebih besar dalam distribusi pengeluaran, sebaliknya penduduk miskin memiliki andil yang sangat kecil dalam distribusi pengeluaran kabupaten tersebut. Selengkapnya tersaji dalam Tabel L.11.

**Gambar 4.10. Perkembangan Koefisien Gini Maluku Utara Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011-2013**



Indikator lain untuk melihat distribusi pendapatan antar kelompok penduduk adalah Kriteria Bank Dunia. Kriteria Bank Dunia membagi kelompok penduduk menjadi tiga bagian besar, yaitu 40 persen terbawah, 40 persen menengah, dan 20 persen teratas. Gambar 4.11. berikut ini menyajikan distribusi pendapatan berdasarkan kriteria Bank Dunia. Berdasarkan Kriteria Bank Dunia tersebut, menunjukkan indikasi bahwa tingkat ketimpangan distribusi pengeluaran penduduk Maluku Utara, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan masih tergolong rendah karena proporsi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terendah masih di atas 17 persen.

**Gambar 4.11. Distribusi Pengeluaran Penduduk Maluku Utara Tahun 2013**



Dari gambar tersebut juga dapat dilihat bahwa distribusi pengeluaran paling besar berada pada 20 persen penduduk dengan pengeluaran tertinggi. Hal ini sangat wajar mengingat merekalah yang paling memiliki potensi untuk melakukan konsumsi. Namun demikian, apabila pada kelompok penduduk 20 persen teratas ini terlalu mendominasi, maka yang terjadi adalah distribusi pengeluaran pada kelompok di bawahnya akan lebih kecil sehingga akan terjadi ketimpangan pengeluaran.

## **BAB V**

### **KARAKTERISTIK RUMAH TANGGA MISKIN**

#### **DI PROVINSI MALUKU UTARA**

Pengukuran kemiskinan yang terpercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

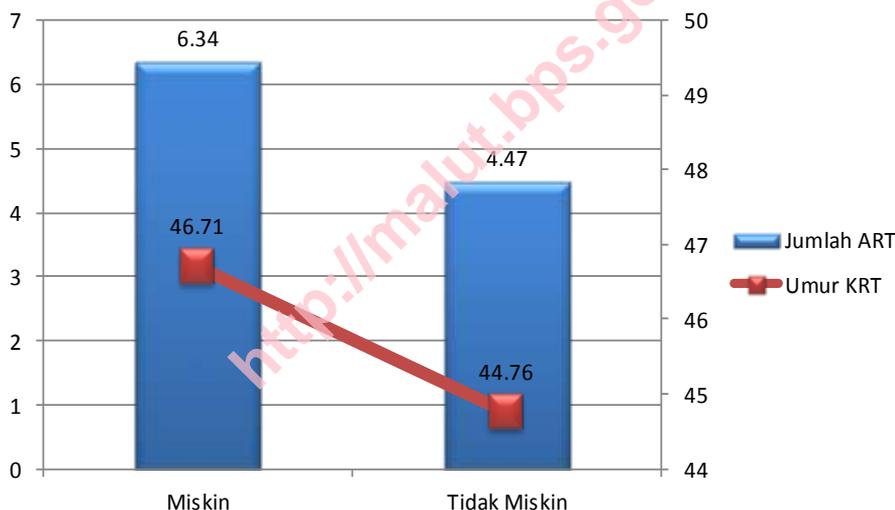
Di samping tersedianya data makro yang akurat, ketersediaan profil kemiskinan menjadi sangat penting agar kebijakan program penanggulangan kemiskinan menjadi tepat sasaran dan dapat difokuskan sesuai dengan kebutuhan penduduk miskin tersebut.

Karakteristik rumah tangga miskin diharapkan dapat mengungkap persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi oleh penduduk miskin dan akar persoalan yang selalu menjerat penduduk miskin sehingga tidak mampu terbebas dari kemiskinan dari waktu ke waktu. Selain itu juga diharapkan dapat mendukung usaha-usaha menurunkan kemiskinan agregat. Pemahaman menyeluruh mengenai karakteristik sosial demografi dan dimensi ekonomi penduduk miskin diharapkan mampu membantu perencanaan, pengawasan, dan evaluasi dari program penanggulangan kemiskinan yang efektif dan efisien.

## 5.1. Karakteristik Sosial Demografi

Karakteristik sosial demografi yang disajikan meliputi rata-rata jumlah anggota rumah tangga dan rata-rata usia kepala rumah tangga. Kedua karakteristik sosial demografi tersebut dibandingkan dengan melihat proporsi rumah tangga yang dikategorikan sebagai miskin dan tidak miskin.

**Gambar 5.1. Perbandingan Karakteristik Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin di Provinsi Maluku Utara, Tahun 2013**



Rata-rata jumlah anggota rumah tangga pada rumah tangga miskin di Maluku Utara pada tahun 2013 yaitu 6,34 orang, sedangkan pada rumah tangga tidak miskin hanya 4,47 orang. Indikasi ini membuktikan bahwa rumah tangga miskin cenderung mempunyai jumlah anggota rumah tangga yang lebih banyak karena rumah tangga miskin cenderung mempunyai tingkat kelahiran yang tinggi. Tingkat kematian anak pada rumah tangga miskin juga relatif tinggi akibat kurangnya pendapatan dan akses kesehatan serta pemenuhan gizi anak mereka.

Dengan demikian, jumlah anggota rumah tangga yang besar dapat menghambat peningkatan sumber daya manusia masa depan, yang dalam hal ini adalah anak-anak.

Rata-rata umur kepala rumah tangga digunakan untuk melihat distribusi umur dan produktivitas kerja dalam memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga. Meskipun demikian, hubungan antara umur dan produktivitas kerja tidak selalu linier. Dari Gambar 5.1 terlihat bahwa rata-rata umur kepala rumah tangga miskin adalah 46,71 tahun, lebih tinggi dari rata-rata umur kepala rumah tangga tidak miskin yang hanya 44,76 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi umur pada kepala rumah tangga miskin memiliki struktur yang lebih tua dibandingkan dengan rumah tangga tidak miskin.

## **5.2. Karakteristik Tempat Tinggal (Perumahan)**

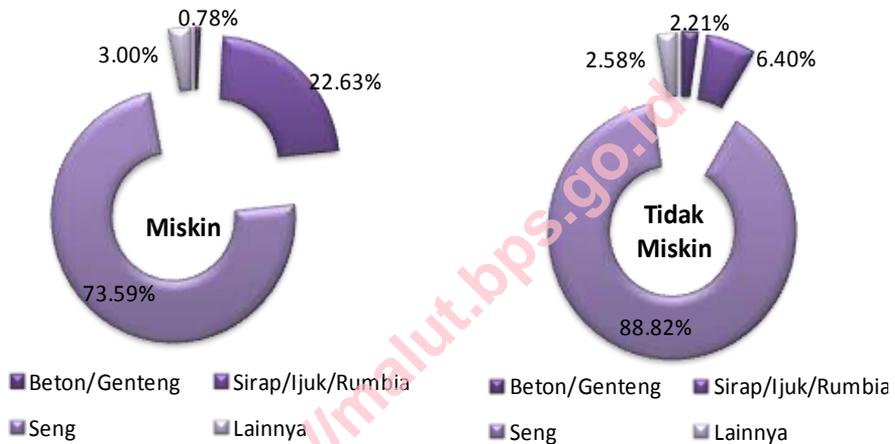
### **5.2.1. Jenis Atap**

Gambar 5.2 menyajikan jenis atap rumah terluas pada masing-masing kategori rumah tangga. Pada umumnya masyarakat Maluku Utara menggunakan seng sebagai atap rumah mereka. Oleh sebab itu, jenis atap ini pada masing-masing kategori rumah tangga merupakan penyumbang persentase terbesar.

Pada rumah tangga miskin, sebanyak 22,63 persen menggunakan sirap/ijuk/rumbia sebagai atap. Hal ini disebabkan karena sirap/ijuk/rumbia lebih murah dan mudah didapatkan. Sedangkan pada rumah tangga tidak miskin hanya sebesar 6,40 persen. Penggunaan beton dan genteng di masyarakat Maluku Utara tidak lazim, yang ditunjukkan dengan rendahnya persentase

penggunaan kedua jenis atap tersebut, baik pada rumah tangga miskin maupun tidak miskin.

**Gambar 5.2. Jenis Atap Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin di Provinsi Maluku Utara Tahun 2013**



### 5.2.2. Jenis Dinding

Berdasarkan jenis dinding rumah, dari Gambar 5.3 terlihat bahwa sebagian besar rumah penduduk Maluku Utara terbuat dari tembok, baik pada kategori miskin maupun tidak miskin. Meskipun demikian, hanya separuh rumah tangga miskin yang memiliki rumah berdinding tembok. Sedangkan pada rumah tangga tidak miskin jauh lebih banyak, yaitu 74,10 persen.

Sebanyak 39,97 persen rumah tangga miskin dan 22,67 persen rumah tangga tidak miskin memilih kayu sebagai dinding rumah. Rumah berdinding kayu banyak dijumpai pada daerah tepi pantai atau laut.

**Gambar 5.3. Jenis Dinding Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin di Provinsi Maluku Utara Tahun 2013**

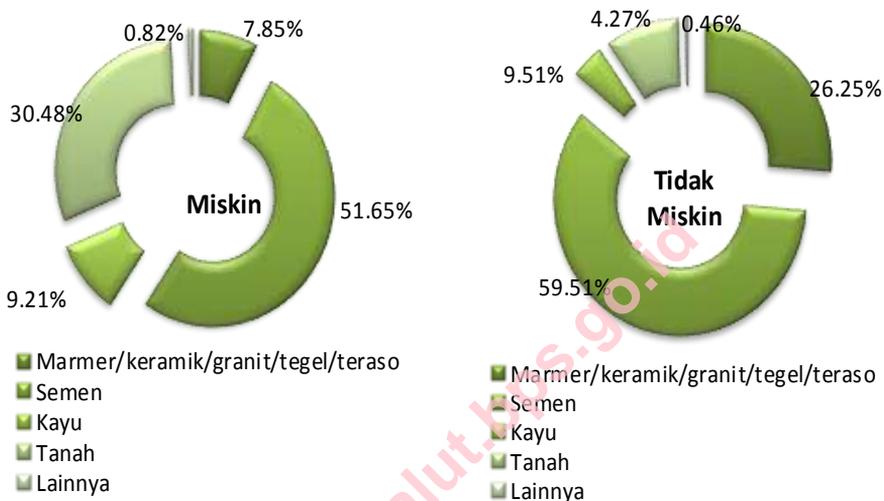


### 5.2.3. Jenis Lantai

Gambar 5.4. menyajikan jenis lantai rumah yang digunakan oleh rumah tangga miskin dan tidak miskin. Separuh rumah tangga pada masing-masing kategori memiliki rumah berlantai terluas semen, yaitu 51,65 persen rumah tangga miskin dan 59,51 persen rumah tangga tidak miskin. Pada rumah tangga miskin, hampir sepertiganya (30,94 persen) memiliki rumah berlantai tanah. Sedangkan pada rumah tangga tidak miskin hanya sebesar 9,51 persen.

Sebanyak 7,85 persen rumah tangga miskin telah memiliki lantai keramik, sedangkan pada rumah tangga tidak miskin sebesar 26,25 persen. Penggunaan kayu sebagai lantai rumah yang umumnya dijumpai pada daerah pantai, dipilih oleh 9,2 persen rumah tangga miskin dan 4,3 persen rumah tangga tidak miskin.

**Gambar 5.4. Jenis Lantai Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin di Provinsi Maluku Utara Tahun 2013**

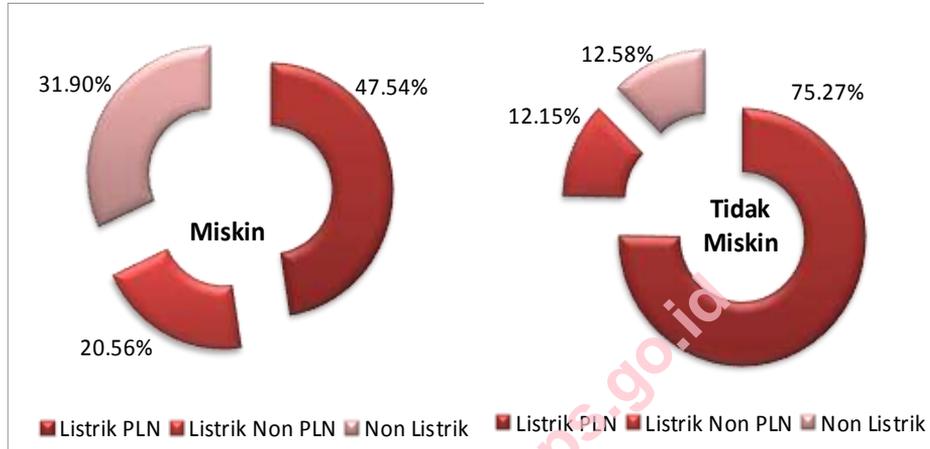


#### 5.2.4. Sumber Penerangan

Sebagian besar penduduk Maluku Utara telah memiliki listrik sebagai sumber penerangan utama mereka, baik listrik PLN maupun non PLN. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya persentase rumah tangga yang memiliki listrik, baik pada rumah tangga miskin maupun tidak miskin. Pada rumah tangga miskin, sebanyak 47,54 persen rumah tangga menggunakan listrik PLN dan 20,56 persen rumah tangga menggunakan listrik non PLN. Sisanya, hampir sepertiga (sebanyak 31,90 persen) rumah tangga masih belum menggunakan listrik. Mereka menggunakan petromak, aladin, pelita, sentir, obor, lilin dan lainnya. Sedangkan pada kelompok rumah tangga tidak miskin, masih terdapat 12,58 persen yang belum memiliki listrik.

**Gambar 5.5. Sumber Penerangan Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin**

## di Provinsi Maluku Utara Tahun 2013



### 5.2.5. Sumber Air Minum dan Cara Memperolehnya

Ketersediaan fasilitas air bersih sebagai sumber air minum untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangga merupakan indikator perumahan yang juga dapat mencirikan sehat tidaknya suatu rumah. Air bersih dalam uraian berikutnya didefinisikan sebagai air yang bersumber dari air kemasan/ledeng/PAM/sumur terlindung/mata air terlindung. Ketidakterediaan air bersih di rumah tangga adalah salah satu indikasi dari kemiskinan.

Dilihat dari distribusi rumah tangga miskin menurut ketersediaan air bersih, tampak bahwa 64,1 persen rumah tangga miskin telah menikmati air bersih sebagai sumber air minum, sedangkan pada rumah tangga tidak miskin yang telah menikmati air bersih sebanyak 78,2 persen.

**Gambar 5.6. Ketersediaan Air Bersih Rumah Tangga Miskin**

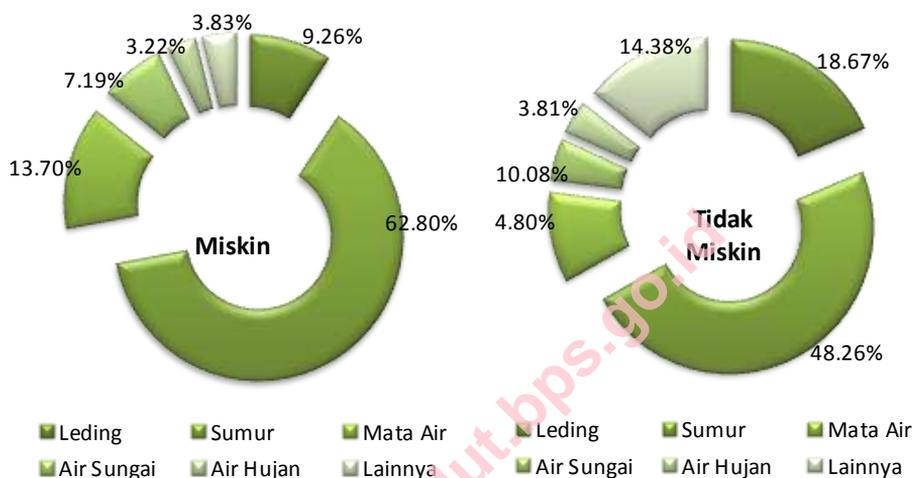
### dan Tidak Miskin di Provinsi Maluku Utara Tahun 2013



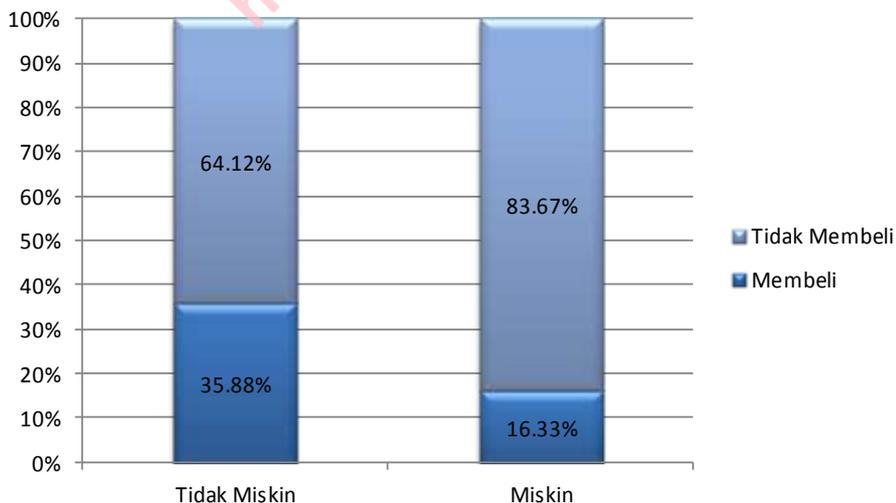
Menurut sumber air minum yang digunakan, rumah tangga miskin paling banyak menggunakan air sumur, yaitu sebesar 62,80 persen. Selanjutnya, sumber air minum yang paling banyak digunakan adalah mata air dan leding, yaitu masing-masing sebesar 13,70 persen dan 9,26 persen. Berbeda dengan rumah tangga miskin, kurang dari separuh rumah tangga tidak miskin menggunakan air sumur, yaitu sebanyak 48,26 persen. Sumber air minum yang terbanyak digunakan oleh rumah tangga tidak miskin setelah air sumur adalah leding dan lainnya (air kemasan bermerk, air isi ulang, dll).

Berdasarkan cara memperoleh air minum, terdapat 16,33 persen rumah tangga miskin yang membeli. Sedangkan pada rumah tangga tidak miskin, lebih dari sepertiganya membeli air minum, yaitu sebanyak 35,88 persen.

**Gambar 5.7. Sumber Air Minum Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin di Provinsi Maluku Utara Tahun 2013**



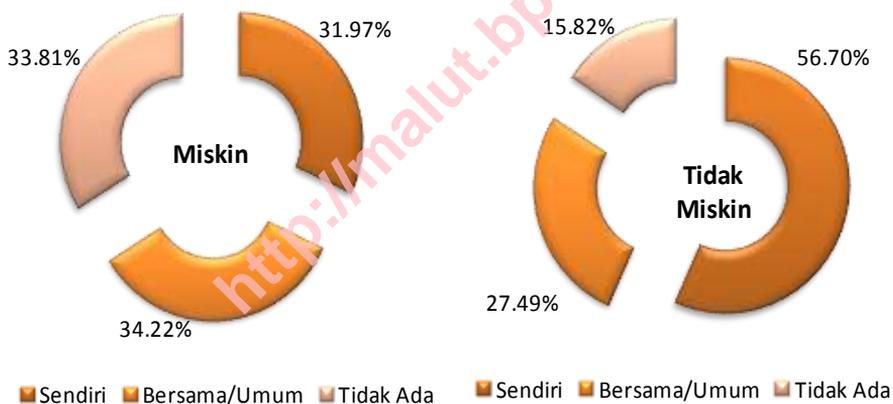
**Gambar 5.8. Cara Memperoleh Sumber Air Minum Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin di Provinsi Maluku Utara Tahun 2013**



## 5.2.6. Jenis Jamban

Ketersediaan jamban menjadi salah satu fasilitas rumah sehat yang sangat penting dalam mendukung pola hidup sehat. Di samping ada tidaknya jamban, indikator penggunaan fasilitas jamban juga penting, di mana dibedakan atas jamban sendiri, jamban bersama/jamban umum, dan tidak ada (tidak menggunakan jamban).

**Gambar 5.9. Jenis Jamban Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin di Provinsi Maluku Utara Tahun 2013**



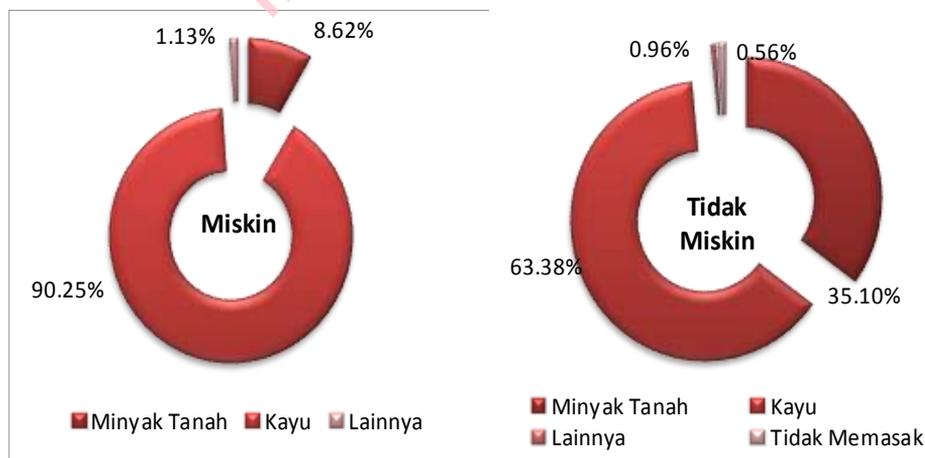
Dilihat dari distribusi rumah tangga miskin menurut ketersediaan dan penggunaan fasilitas, tampak bahwa persentase rumah tangga miskin yang menggunakan jamban sendiri sebesar 31,97 persen dan yang menggunakan jamban bersama/umum sebesar 34,22 persen. Adapun persentase rumah tangga miskin yang tidak memiliki jamban sebesar 33,81 persen atau hampir sepertiga rumah tangga miskin. Tingginya persentase rumah tangga miskin yang tidak memiliki jamban mencerminkan rendahnya kemampuan ekonomi rumah tangga.

### 5.2.7. Bahan Bakar Utama untuk Memasak

Masyarakat Maluku Utara umumnya menggunakan minyak tanah dan kayu sebagai bahan bakar utama untuk memasak. Pada daerah perkotaan, sebagian kecil rumah tangga telah menggunakan listrik dan gas (LPG). Akan tetapi masyarakat perdesaan masih belum beralih pada kedua bahan bakar tersebut.

Seperti terlihat dalam Gambar 5.10, hampir seluruh rumah tangga miskin menggunakan kayu sebagai bahan bakar utama untuk memasak. Hanya 8,26 persen rumah tangga yang menggunakan minyak tanah. Sisanya, sebanyak 1,13 persen menggunakan bahan bakar lainnya seperti serbuk kayu, dsb. Sedangkan pada penduduk tidak miskin, 35,10 persen rumah tangga telah menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar utama untuk memasak.

**Gambar 5.10. Bahan Bakar Utama Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin di Provinsi Maluku Utara Tahun 2013**



### 5.3. Karakteristik Ketenagakerjaan

Sumber penghasilan utama rumah tangga menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan yang diharapkan dapat mencerminkan kondisi sosial ekonomi suatu rumah tangga. Salah satu karakteristik ketenagakerjaan yang dapat menggambarkan adanya perbedaan antara rumah tangga miskin dan tidak miskin adalah lapangan usaha atau sektor yang menjadi sumber penghasilan utama rumah tangga. Profil orang miskin seringkali melekat dengan mereka yang bekerja di sektor pertanian, seperti petani gurem, nelayan, buruh tani dan perkebunan, serta pencari kayu dan madu di hutan.

**Gambar 5.11. Sumber Penghasilan Utama Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Menurut Sektor di Provinsi Maluku Utara Tahun 2013**



Distribusi rumah tangga miskin menurut sumber penghasilan utama kepala rumah tangga disajikan pada Gambar 5.11. Dari gambar tersebut, terlihat bahwa hanya seperempat rumah tangga miskin yang memiliki sumber

penghasilan utama dari sektor selain pertanian, yaitu sebesar 23,09 persen. Sedangkan pada rumah tangga tidak miskin, lebih dari separuhnya memiliki sumber penghasilan utama dari sektor selain pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sangat diperlukan kebijakan untuk meningkatkan pendapatan petani dan pekerja di sektor pertanian.

**Gambar 5.12. Sumber Penghasilan Utama Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Menurut Status di Provinsi Maluku Utara Tahun 2013**



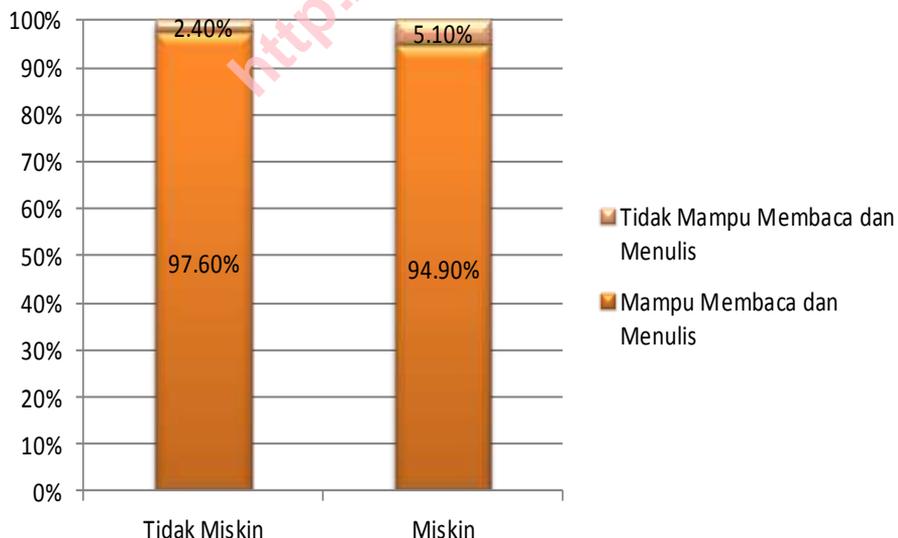
Indikator lain yang dapat mencerminkan kesejahteraan suatu rumah tangga yaitu status pekerjaan. Dilihat dari distribusi rumah tangga miskin menurut status pekerjaan utama yang disajikan pada Gambar 5.11, terlihat bahwa paling banyak yaitu sekitar 80,11 persen rumah tangga miskin memiliki penghasilan utama dengan berusaha, baik berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tetap/dibayar, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar, maupun pekerja bebas. Sedangkan pada rumah tangga tidak miskin, hanya sebesar 60,17 persen. Sisanya, 37,38 persen merupakan buruh/karyawan/pegawai dan 2,45

persen sebagai penerima pendapatan (misalnya pensiunan, pemilik kontrakan, dsb). Pada rumah tangga miskin tidak ada yang memiliki status sebagai penerima pendapatan.

#### 5.4. Karakteristik Pendidikan

Hubungan antara kemiskinan dan pendidikan sangat penting, karena pendidikan sangat berperan dalam mempengaruhi angka kemiskinan. Orang yang berpendidikan lebih baik akan mempunyai peluang yang lebih rendah menjadi miskin. Karakteristik pendidikan yang diuraikan disini adalah persentase kepala rumah tangga dalam kemampuan membaca dan menulis serta tingkat pendidikan tertinggi kepala rumah tangga.

**Gambar 5.13. Kemampuan Membaca dan Menulis Kepala Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin di Provinsi Maluku Utara Tahun 2013**



Sebanyak 5,1 persen kepala rumah tangga miskin tidak mampu membaca dan menulis, baik huruf latin maupun huruf lainnya. Sedangkan pada rumah tangga tidak miskin hanya sebesar 2,4 persen. Ketidakmampuan membaca dan menulis ini disumbang oleh 4,9 persen kepala rumah tangga miskin dan 2,1 persen kepala rumah tangga tidak miskin yang tidak pernah mengenyam bangku pendidikan.

**Gambar 5.14. Pendidikan Tertinggi Kepala Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin di Provinsi Maluku Utara Tahun 2013**



Berdasarkan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan, pendidikan tertinggi yang paling banyak ditamatkan kepala rumah tangga miskin adalah pendidikan dasar (SD atau SMP), yaitu sebesar 51,5 persen, sedangkan jenjang pendidikan SMA ke atas hanya sebesar 12,2 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga miskin memiliki karakteristik pendidikan yang kurang baik atau rendah.

## 5.5. Program Bantuan kepada Rumah Tangga Miskin

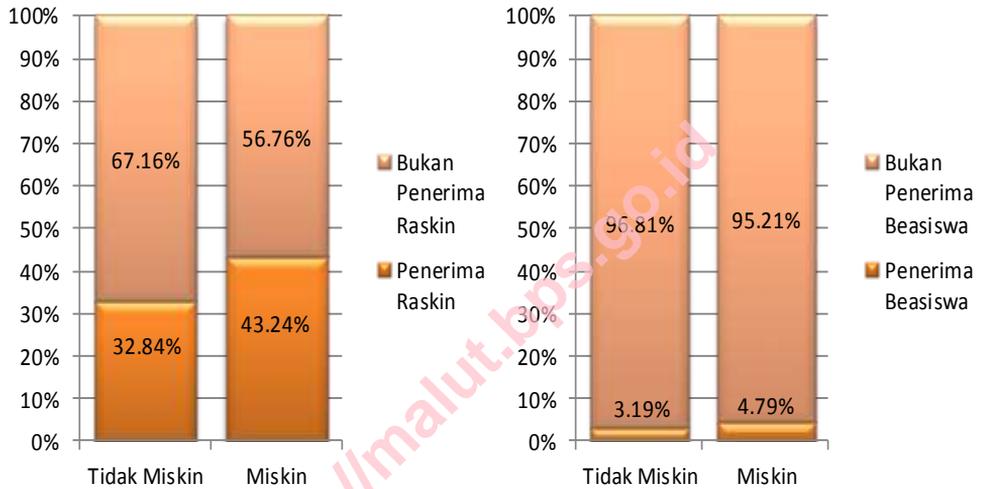
Dalam upaya menanggulangi kemiskinan, Pemerintah melakukan berbagai langkah konsolidasi yang diwujudkan dalam 3 (tiga) paket bantuan program untuk penduduk miskin dan hampir miskin. Paket bantuan tersebut yaitu:

1. Paket Bantuan Program I: Bantuan dan Perlindungan Sosial melalui beras miskin (raskin), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Keluarga Harapan dan Bantuan Langsung Tunai.
2. Paket Bantuan Program II: Pemberdayaan Masyarakat melalui PNPM Mandiri.
3. Paket Bantuan Program III: Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK-KUR).

Analisis berikut ini akan menyajikan persentase rumah tangga miskin yang memperoleh raskin dan beasiswa selain BOS, baik yang diberikan oleh pemerintah maupun selain pemerintah. Angka persentase yang didapat merupakan hasil estimasi berdasarkan data Susenas gabungan selama tahun 2013.

Seperti terlihat dalam Gambar 5.15, sebanyak 56,76 persen rumah tangga miskin belum mendapatkan bantuan beras miskin (raskin). Sebaliknya, sebanyak 32,84 persen rumah tangga tidak miskin justru mendapatkan bantuan beras miskin. Sedangkan untuk penerima beasiswa selain BOS, persentasenya masih sangat kecil sekali, baik untuk rumah tangga miskin maupun rumah tangga tidak miskin. Meskipun demikian, persentase rumah tangga miskin yang memperoleh beasiswa lebih banyak, yaitu 4,79 persen dibandingkan dengan rumah tangga tidak miskin yang hanya sebesar 3,19 persen.

**Gambar 5.15. Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Penerima Raskin dan Beasiswa di Provinsi Maluku Utara Tahun 2013**





TABEL TABEL

<http://malut.bps.go.id>

**Tabel L.1. Garis Kemiskinan di Provinsi Maluku Utara  
Menurut Daerah, Tahun 2009 – 2013**

(dalam ribuan rupiah)

Tahun	Kategori		
	Perkotaan	Perdesaaan	Perkotaan + Perdesaan
<b>2009</b>	226,7	190,8	201,5
<b>2010</b>	238,5	202,1	212,9
<b>2011</b>	251,4	215,4	225,2
<b>2012</b>	268,7	232,1	242,1
<b>2013</b>	<b>284,3</b>	<b>248,0</b>	<b>258,1</b>

**Tabel L.2. Garis Kemiskinan di Provinsi Maluku Utara  
Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2011 – 2013**

(dalam ribuan rupiah)

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Halmahera Barat</b>	226,1	238,6	251,4
<b>Halmahera Tengah</b>	296,6	315,6	335,1
<b>Kepulauan Sula</b>	232,7	245,6	264,2
<b>Halmahera Selatan</b>	209,4	219,9	230,6
<b>Halmahera Utara</b>	170,5	177,6	184,4
<b>Halmahera Timur</b>	344,6	373,9	410,2
<b>Pulau Morotai</b>	183,2	191,3	200,0
<b>Ternate</b>	361,7	392,3	418,4
<b>Tidore Kepulauan</b>	278,3	295,7	314,3

**Tabel L.3. Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Maluku Utara  
Menurut Daerah, Tahun 2009 – 2013**

(dalam ribuan)

Tahun	Kategori		
	Perkotaan	Perdesaaan	Perkotaan + Perdesaan
<b>2009</b>	8,72	89,27	98,00
<b>2010</b>	7,64	83,44	91,07
<b>2011</b>	8,10	89,33	97,43
<b>2012</b>	7,57	84,35	91,91
<b>2013</b>	<b>9,16</b>	<b>74,04</b>	<b>83,20</b>

**Tabel L.4. Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Maluku Utara  
Menurut Daerah, Tahun 2009 – 2013**

(dalam persen)

Tahun	Kategori		
	Perkotaan	Perdesaaan	Perkotaan + Perdesaan
<b>2009</b>	3,10	13,42	10,36
<b>2010</b>	2,66	12,28	9,42
<b>2011</b>	2,80	11,58	9,18
<b>2012</b>	2,55	10,69	8,47
<b>2013</b>	<b>2,99</b>	<b>9,22</b>	<b>7,50</b>

**Tabel L.5. Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Maluku Utara  
Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2011 – 2013**

(dalam ribuan)

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013
Halmahera Barat	13,41	11,17	10,49
Halmahera Tengah	10,01	8,47	8,27
Kepulauan Sula	14,24	11,81	12,97
Halmahera Selatan	16,62	13,69	12,85
Halmahera Utara	14,12	11,46	10,26
Halmahera Timur	15,62	12,86	13,33
Pulau Morotai	6,32	5,33	5,32
Ternate	9,88	7,95	6,61
Tidore Kepulauan	6,82	5,61	5,47

**Tabel L.6. Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Maluku Utara  
Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2011 – 2013**

(dalam persen)

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Halmahera Barat</b>	12,93	10,61	9,78
<b>Halmahera Tengah</b>	22,68	18,40	17,44
<b>Kepulauan Sula</b>	10,42	8,50	9,16
<b>Halmahera Selatan</b>	8,11	6,56	6,04
<b>Halmahera Utara</b>	8,46	6,72	5,90
<b>Halmahera Timur</b>	20,72	16,34	16,43
<b>Pulau Morotai</b>	11,61	9,45	9,18
<b>Ternate</b>	5,16	4,00	3,24
<b>Tidore Kepulauan</b>	7,34	6,00	5,77

**Tabel L.7. Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Maluku Utara  
Menurut Daerah, Tahun 2009 – 2013**

Tahun	Kategori		
	Perkotaan	Perdesaaan	Perkotaan + Perdesaan
<b>2009</b>	0.073	2.024	1.445
<b>2010</b>	0.059	2.067	1.471
<b>2011</b>	0.149	1.496	1.128
<b>2012</b>	0.279	1.823	1.402
<b>2013</b>	<b>0.314</b>	<b>0.951</b>	<b>0.775</b>

**Tabel L.8. Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Maluku Utara  
Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2011 – 2013**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Halmahera Barat</b>	1.74	1.00	1.15
<b>Halmahera Tengah</b>	3.92	3.07	1.82
<b>Kepulauan Sula</b>	1.54	1.47	1.18
<b>Halmahera Selatan</b>	0.78	0.94	0.65
<b>Halmahera Utara</b>	1.29	1.03	0.54
<b>Halmahera Timur</b>	3.89	2.71	2.42
<b>Pulau Morotai</b>	1.20	1.25	0.69
<b>Ternate</b>	0.40	0.27	0.16
<b>Tidore Kepulauan</b>	0.75	0.66	0.54

**Tabel L.9. Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Maluku Utara  
Menurut Daerah, Tahun 2009 – 2013**

Tahun	Kategori		
	Perkotaan	Perdesaaan	Perkotaan + Perdesaan
<b>2009</b>	0.003	0.512	0.361
<b>2010</b>	0.002	0.464	0.327
<b>2011</b>	0.010	0.230	0.206
<b>2012</b>	0.090	0.459	0.359
<b>2013</b>	<b>0.046</b>	<b>0.178</b>	<b>0.141</b>

**Tabel L.10. Indeks Keperahan Kemiskinan Provinsi Maluku Utara  
Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2011 – 2013**

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013
Halmahera Barat	0.35	0.16	0.20
Halmahera Tengah	1.03	0.77	0.03
Kepulauan Sula	0.46	0.39	0.02
Halmahera Selatan	0.12	0.18	0.13
Halmahera Utara	0.29	0.26	0.10
Halmahera Timur	0.91	0.72	0.49
Pulau Morotai	0.20	0.30	0.08
Ternate	0.08	0.02	0.01
Tidore Kepulauan	0.20	0.13	0.08

**Tabel L.11. Koefisien Gini Provinsi Maluku Utara  
Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2011 – 2013**

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013
Halmahera Barat	0.255	0.252	0.223
Halmahera Tengah	0.286	0.282	0.257
Kepulauan Sula	0.316	0.317	0.267
Halmahera Selatan	0.248	0.266	0.274
Halmahera Utara	0.283	0.338	0.253
Halmahera Timur	0.297	0.261	0.248
Pulau Morotai	0.262	0.287	0.315
Ternate	0.276	0.289	0.254
Tidore Kepulauan	0.251	0.239	0.257
<b>MALUKU UTARA</b>	<b>0.335</b>	<b>0.332</b>	<b>0.315</b>

**Tabel L.12. Distribusi Pengeluaran Menurut Kriteria *World Bank*  
Tahun 2013**

(dalam persen)

Kelompok Pendapatan	Kategori		
	Perkotaan	Perdesaaan	Perkotaan + Perdesaan
<b>40% Bawah</b>	19.027	23.470	20.517
<b>40% Tengah</b>	40.649	40.291	38.314
<b>20% Atas</b>	40.323	36.238	41.169

**Tabel L.13. Karakteristik Perumahan Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Provinsi Maluku Utara Tahun 2013**

(dalam persen)

Karakteristik		Rumah Tangga Miskin	Rumah Tangga Tidak Miskin
Jenis Atap Terluas	Beton/Genteng	2.21	0.78
	Sirap/Ijuk/Rumbia	6.40	22.63
	Seng	88.82	73.59
	Lainnya	2.58	3.00
Jenis Dinding Terluas	Tembok	74.10	55.41
	Kayu	22.67	39.97
	Bambu	1.79	2.80
	Lainnya	1.44	1.82
Jenis Lantai Terluas	Marmer/keramik/granit/tegel/teraso	26.25	7.85
	Semen	59.51	51.65
	Kayu	4.27	9.21
	Tanah	9.51	30.48
	Lainnya	0.46	0.82
Sumber Penerangan	Listrik PLN	75.27	47.54
	Listrik Non PLN	12.15	20.56
	Non Listrik	12.58	31.90

**Lanjutan Tabel L.13.**

(dalam persen)

Sumber Air Minum Utama	Leding	18.67	9.26
	Sumur	48.26	62.80
	Mata Air	10.08	13.70
	Air Sungai	4.80	7.19
	Air Hujan	3.81	3.22
	Lainnya	14.38	3.83
	Cara Memperoleh Air Minum	Membeli	35.88
Tidak Membeli		64.12	83.67
Jenis Air Minum	Air Bersih	78.23	64.07
	Lainnya	21.77	35.94
Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar	Sendiri	56.70	31.97
	Bersama/Umum	27.49	34.22
	Tidak Ada	15.82	33.81
Bahan Bakar Utama untuk Memasak	Minyak Tanah	35.10	8.62
	Kayu	63.38	90.26
	Lainnya	0.56	1.13
	Tidak Memasak	0.96	-

**Tabel L.14. Karakteristik Sosial Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Provinsi Maluku Utara Tahun 2013**

(dalam persen)

Karakteristik		Rumah Tangga Miskin	Rumah Tangga Tidak Miskin
<b>Jumlah ART</b>	Rata-rata	6.34	4.47
<b>Umur KRT</b>	Rata-rata	46.71	44.76
<b>Jenis Kelamin KRT</b>	Laki-Laki	89.21	88.46
	Perempuan	10.79	11.54
<b>Sumber Penghasilan Terbesar Rumah Tangga</b>	Sektor Pertanian	45.07	76.92
	Bukan Sektor Pertanian	54.93	23.09
<b>Sumber Penghasilan Terbesar Rumah Tangga</b>	Penerima Pendapatan	2.45	-
	Karyawan/Buruh	37.38	19.89
	Berusaha	60.17	80.12
<b>Partisipasi Sekolah KRT</b>	Tidak Pernah Bersekolah	2.14	4.92
	Pernah Bersekolah	97.86	95.08
<b>Kemampuan Membaca dan Menulis KRT</b>	Mampu Membaca dan Menulis	97.60	94.90
	Tidak Mampu Membaca dan Menulis	2.40	5.10
<b>Pendidikan Yang Ditamatkan KRT</b>	Tidak Tamat SD	15.93	36.28
	Tamat SD/SMP	48.90	51.54
	Tamat SMA+	35.17	12.18

**Tabel L.15. Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin  
Penerima Bantuan di Provinsi Maluku Utara Tahun 2013**

(dalam persen)

Jenis Bantuan		Rumah Tangga Miskin	Rumah Tangga Tidak Miskin
Raskin	Penerima Raskin	32.84	43.24
	Bukan Penerima Raskin	67.16	56.76
Beasiswa	Penerima Beasiswa	3.19	4.79
	Bukan Penerima Beasiswa	96.81	95.21

# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA

<http://malut.bps.go.id>



*Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara*

Jl. Stadion No. 65, Ternate

Telp : (0921) 3127878, Fax : (0921) 3126301

Homepage : <http://malut.bps.go.id>, Email : [malut@bps.go.id](mailto:malut@bps.go.id)